



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP : (021) - 22791400
FAX : (021) - 22791452
(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id
home page : <http://bptj.dephub.go.id>

Nomor : UM.006/2/20/BPTJ/2023
Klasifikasi :
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penyerahan Data Dukung
Penyusunan Laporan Tahunan
Kementerian Perhubungan Tahun
2022

Jakarta, 14 April 2023

Yth. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
Kementerian Perhubungan

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: UM.006/3/22 Phb 2023 perihal Permohonan Data Dukung Penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2022, bersama ini terlampir disampaikan data dukung BPTJ untuk penyusunan Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan,

Agung Raharjo
NIP. 19631018 198903 1 001



LAPORAN TAHUNAN 2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK



@bptj151

www.bptj.dephub.go.id



IKHTISAR

Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan transportasi yang unggul dan handal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi. Tugas pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan ini kemudian diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan ataupun program yang terdapat dalam Rencana Strategis BPTJ dan Rencana Induk Transportasi yang tertuang pada Rencana Kerja Tahunan dan kemudian realisasi pelaksanaannya dilaporkan pada Laporan Tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan strategis, baik yang menggunakan APBN maupun non APBN dengan kriteria skala nasional, untuk mengembangkan transportasi wilayah Jabodetabek. Kegiatan strategis tersebut yaitu program subsidi angkutan umum *Buy The Service* (BTS), Fasilitasi teknis fasilitas sistem keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan di Jabodetabek, pembangunan fasilitas integrasi (*Skybridge*) Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede, dan Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg.

Laporan Tahunan selain merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun, juga merupakan salah satu bentuk laporan berkala yang disusun berjenjang mulai dari Unit Kerja Eselon I dan tingkat Kementerian. Data dan informasi yang akurat menjadi kunci penulisan Laporan Tahunan. Laporan Tahunan BPTJ Tahun 2022 disusun dengan pendekatan pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tertuang dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi perkotaan yang unggul dan handal, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Laporan Tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2022 disusun selain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan, juga sebagai pertanggungjawaban kepada publik terkait pelaksanaan tugas dan kebijakan di sektor transportasi selama satu tahun anggaran 2022. Laporan Tahunan ini menyajikan berbagai informasi terkait pembangunan dan pengembangan, sarana, prasarana dan pelayanan transportasi di wilayah Jabodetabek dengan mengacu pada Rencana Strategis BPTJ Tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 – 2029.

Berkat dukungan dan kerja sama dari seluruh jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Laporan Tahunan ini dapat diselesaikan. Meskipun dalam laporan ini masih terdapat kekurangan, namun diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan rujukan bagi para pemangku kepentingan serta umpan balik bagi jajaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Tahunan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Tahun 2022 ini.

**KEPALA
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**


Dr. UMAR ARIS, S.H., M.M., M.H.



DAFTAR ISI

IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PROFIL PIMPINAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	1
B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	2
C. Komposisi Pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	4
D. Visi dan Misi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.....	6
E. Sejarah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	6
BAB II KILAS KINERJA BPTJ TAHUN 2022	7
A. Peristiwa Penting	7
B. Penghargaan BPTJ Tahun 2022.....	10
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA BPTJ	13
A. Profil SDM BPTJ	13
B. Pengelolaan SDM BPTJ.....	15
C. Peningkatan Kapasitas SDM BPTJ.....	17
BAB IV KEGIATAN STRATEGIS.....	19
A. Peristiwa Penting, berskala nasional dan/atau internasional	19
B. Kegiatan BPTJ Dalam Menunjang Program Kerja Presiden	24
BAB V SARANA	28
A. Alat Angkutan Bermotor.....	28
B. Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek.....	29
C. Area Traffic Control System (ATCS).....	31
BAB VI PRASARANA	34
A. Terminal Tipe A Pondok Cabe	34
B. Terminal Tipe A Jatijajar.....	35



C. Terminal Tipe A Baranangsiang	36
D. Terminal Tipe A Poris Plawad	37
BAB VII KETERLIBATAN STAKEHOLDER	38
BAB VIII REGULASI	41
BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN	42
A. Alokasi Anggaran Tahun 2022	42
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022	43
BAB X KEGIATAN PENUNJANG	45
BAB XI PENUTUP	61
LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi ASN dan Pegawai Honorer	4
Tabel 4. 1 Fasilitas Teknis Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Tahun 2022	21
Tabel 5. 1 Data Alat Angkutan Bermotor	28
Tabel 5. 2 Data Perlengkapan Jalan di Wilayah Jabodetabek tahun 2017 s.d. 2022	29
Tabel 8. 1 Penerbitan Peraturan di Lingkungan BPTJ Tahun 2022	41
Tabel 9. 1 Alokasi anggaran BPTJ berdasarkan jenis belanja	42
Tabel 9. 2 Alokasi anggaran BPTJ berdasarkan Kegiatan	42
Tabel 9. 3 Realisasi anggaran per jenis belanja BPTJ tahun 2022	43
Tabel 9. 4 Realisasi anggaran BPTJ berdasarkan Kegiatan	43
Tabel 9. 5 Realisasi anggaran per IKP BPTJ tahun 2022	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPTJ Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022.....	2
Gambar 1. 2 Komposisi PNS Jenjang Pendidikan	5
Gambar 1. 3 Komposisi Tenaga Honorer Jenjang Pendidikan	5
Gambar 2. 1 Rapat Koordinasi BPTJ 2022 yang bertemakan "Sinkronisasi Pengelolaan Transportasi Jabodetabek"	7
Gambar 2. 2 Rapat Koordinasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	9
Gambar 2. 3 Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ VI KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2022).....	10
Gambar 2. 4 Program Subsidi Bus Buy The Service (BTS) Kota Bogor.....	11
Gambar 2. 5 Data Produksi Layanan Buy The Service (BTS) Kota Bogor	12
Gambar 2. 6 Penghargaan Layanan Transportasi Publik Ramah Anak	12
Gambar 3. 1 Jumlah SDM PNS per Unit Kerja BPTJ	13
Gambar 3. 2 Jumlah SDM Tenaga Honorer per Unit Kerja BPTJ.....	14
Gambar 3. 3 Pegawai BPTJ Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	14
Gambar 3. 4 Dokumentasi Finalisasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja SDM ASN	15
Gambar 3. 5 Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Kelembagaan dan Inventarisasi Pembentukan Tata Kelola Pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pondok Cabe	16
Gambar 3. 6 Dokumentasi Bimbingan dan Bantuan Teknis (Bimtek) Penilaian Kinerja	17
Gambar 3. 7 Pelaksanaan Apel Pagi di Lingkungan BPTJ	18
Gambar 4. 1 Pembangunan Skybridge Bojonggede	20
Gambar 4. 2 Fasilitas Teknis Fasilitas Keselamatan dan Keamanan	21
Gambar 4. 3 Rencana Rancangan Stasiun Pondok Rajeg	22
Gambar 4. 4 Kondisi setelah pengangkatan peron bawah.....	23
Gambar 4. 5 Pengangkatan Listrik Aliran Atas.....	23
Gambar 4. 6 Kegiatan Padat Karya di Terminal Baranangsiang	24
Gambar 4. 7 Kegiatan Padat Karya di Terminal Jatijajar.....	25
Gambar 4. 8 Kegiatan Padat Karya di Terminal Pondok Cabe	26
Gambar 4. 9 Kegiatan Padat Karya di Terminal Poris Plawad	27
Gambar 5. 1 Sampel Dokumentasi Alat Angkutan Bermotor di lingkungan BPTJ	28
Gambar 5. 2 Warning Light di Jalan Raya Ciawi – Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ...	29
Gambar 5. 3 Rambu Overhead di Jalan Raya Ciawi – Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	30
Gambar 5. 4 Alat Penerangan Jalan di Jalan Raya Transyogi, Jalan Letda Natsir, Jalan Raya Cimanggis – Nagrak.....	30
Gambar 5. 5 Marka Jalan di Kabupaten Bekasi, Cikarang (Kab. Bekasi - Kab. Karawang)....	31
Gambar 5. 6 Koridor ATCS di Jabodetabek s.d. tahun 2022.....	32
Gambar 5. 7 Perangkat ATCS	32
Gambar 5. 8 Dokumentasi Traffic Light dan Camera/Detector	33
Gambar 5. 9 Variable Message Sign (VMS)	33
Gambar 6. 1 Gedung Terminal Tipe A Pondok Cabe.....	34
Gambar 6. 2 Gedung Terminal Tipe A Jatijajar	35
Gambar 6. 3 Gedung Terminal Tipe A Baranangsiang	36
Gambar 6. 4 Gedung Terminal Tipe A Poris Plawad.....	37
Gambar 7. 1 Sistem Asal-Tujuan Berbasis Big Data.....	40

Gambar 10. 1 a dan b Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPIP 2022 di Lingkungan BPTJ	46
Gambar 10. 2 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPTJ	47
Gambar 10. 3 a dan b Dokumentasi Kegiatan Konsinyering Persiapan Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Tahun 2022 dari tanggal 9 s.d. 11 November 2022	49
Gambar 10. 4 a dan b Dokumentasi Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Perum PPD dilaksanakan di Pool Perum PPD Depok dari tanggal 17 s.d. 19 November 2022.....	50
Gambar 10. 5 a dan b Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru pada tanggal 19 Desember 2022 s.d. 4 Januari 2023 di Terminal Wilayah Jabodetabek	51
Gambar 10. 6 a, b, c, dan d Dokumentasi Kegiatan Ramp Check di Terminal Wilayah Jabodetabek	53
Gambar 10. 7 Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas	55
Gambar 10. 8 Dokumentasi Monitoring Kebutuhan Perambuan di Perlintasan Sebidang Lintas Stasiun Depok Baru - Stasiun Pondok Cina.....	56
Gambar 10. 9 Dokumentasi Monitoring Kebutuhan Perambuan Perlintasan Sebidang di Lintas Stasiun Tenjo – Stasiun Tigaraksa.....	57
Gambar 10. 10 Dokumentasi Aplikasi Peta Interaktif	58
Gambar 10. 11 a, b, dan c Dokumentasi Aplikasi Bus Tracking System	60

PERIODE NOVEMBER 2021 S.D. AGUSTUS 2022

Plt. Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek

Irjen Pol. Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si

Bapak Budi Setiyadi lahir di Banyumas pada tanggal 06 Mei 1962 merupakan Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Beliau menjalani Pendidikan dari mulai SD pada tahun 1974, SMP tahun 1977, SMA tahun 1981, S-1 di Universitas di daerah

Cirebon yaitu Swadaya Gunung Djati pada tahun 1993, dan pada tahun 1999 beliau melanjutkan S-2 di Universitas di Surabaya yaitu Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada masa baktinya beliau memulai karir dari Polres Bogor pada tahun 1987, pada tahun 1986-1987 beliau menjadi KAUR BIN OPS Serse di RES Bogor, Pada tahun 1987 beliau menjabat sebagai KAUR bin OPS Lantas Res Bogor, lalu diangkat menjadi Kapolsek Ciamis Res Bogor pada tahun 1987-1988, pada tahun 1988 beliau menjadi Kasat Serse Polres Bogor dan Kansat Serse Lantas Res Cirebon, kemudian pada tahun 1988-1993 beliau menjadi Kansat Lantas Res Cirebon, pada tahun 1993-1994 beliau menjadi Dan Kie Tar AKPOL, lalu pada tahun 1994-1995 menjadi KASI Min Mentarsis Akpol, pada tahun 1995-1996 menjadi Kabag Lantas Polwil Bojonegoro Polda Jatim, kemudian pada tahun 1996-1999 beliau diangkat sebagai WAKA Polres Nganjuk Polwil Kediri Polda Jatim, kemudian pada tahun 1999-2000 beliau diangkat Pamen Polda Jatim, pada tahun 2000-2001 beliau menjabat sebagai Kasat PRC Dit Lantas Polda Sumsel, lalu pada tahun 2001-2003 beliau menjadi Kapolres Lahat Polda Sumsel, pada tahun 2003-2005 beliau diangkat menjadi Kapolres Ogan Komering Ulu Polda Sumsel, dan pada tahun 2005-2007 Wadir Lantas Polda Sumsel, pada tahun 2007-2008 beliau menjadi Dir Lantas Polda Riau, lalu pada tahun 2008-2009 beliau menjadi Widyaiswara Muda Sespim Polri, kemudian pada tahun 2009-2010 menjadi Dir. Lantas Polda Sulsel, lalu tahun 2010-2012 menjadi Kabagrenmin Korlantas Polri, kemudian pada tahun 2012-2013 menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Regiden Korlantas Polri, pada tahun 2013-2015 menjadi Pamen SSDM Polri, sedangkan 2015-2017 menjadi Pati SSDM Polri, dan pada tahun 2017-2021 beliau menjadi bagian dari Kementerian Perhubungan dan menjabat sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dan pada tahun 2021-2022 beliau menjalani karirnya sebagai Plt. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

PERIODE AGUSTUS 2022 S.D. FEBRUARI 2023

Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek

DR. UMAR ARIS, SH., M.M., M.H.

Dr. Umar Aris, SH., M.M., M.H. lahir di Tanjung Karang Lampung, 20 Februari 1963 adalah birokrat asal Indonesia yang pernah aktif menjabat sebagai Kepala badan penelitian dan pengembangan perhubungan sejak Maret 2021. Memiliki latar belakang

di dunia Perhubungan Laut. Dalam kariernya beliau dimulai pada tahun 1989 dengan menjadi Staf bagian Organisasi Tata Laksana (OTL), lalu pada tahun 1993 dipercaya sebagai Kasubbag Rancangan III, tidak hanya itu pada tahun 1994 beliau dipercaya sebagai Kasubbag I, dan pada tahun 1996 menjadi Kasubbag Rancangan II, pada tahun 1999-2002 menjadi Kasubbag Rancangan Peraturan Trans. Laut, kemudian beliau di percaya sebagai Kabag Hukum Setditjen Hubla pada tahun 2002-2008, setelah menjadi kabag beliau di percaya menjadi Kepala Biro Hukum dan KSLN pada tahun 2008, dan menjadi Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan pada tahun 2014-2021, pada tahun 2021-2022 beliau menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan tahun 2022-2023 telah dipercaya menjadi Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

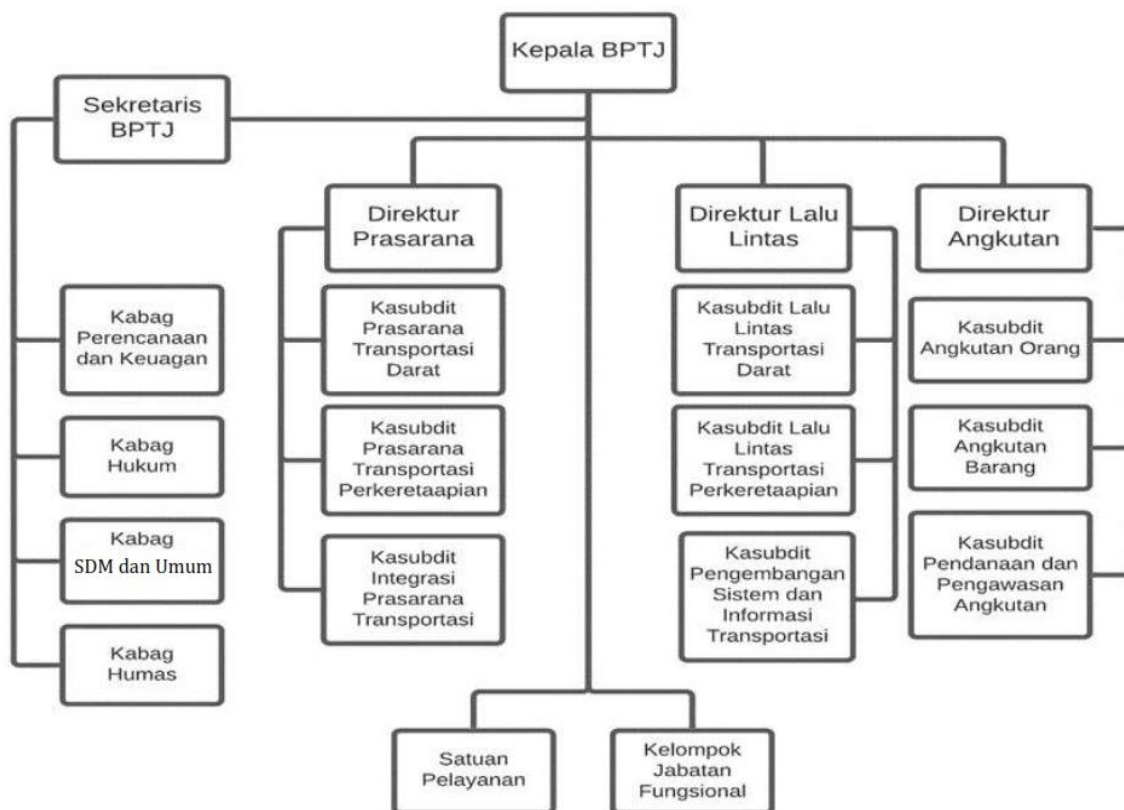
Tugas dan fungsi BPTJ sebagaimana tertuang dalam Pasal 521 dan Pasal 522 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. BPTJ mempunyai tugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPTJ menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana umum dan rencana program kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek berdasarkan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ).
- b. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan rencana umum dan rencana program kegiatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- c. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.
- d. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek.
- e. Fasilitasi teknis, pembiayaan dan/atau manajemen dalam rangka pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas di wilayah Jabodetabek.
- f. Penyusunan rencana pelaksanaan, perencanaan kebutuhan anggaran, dan pelaksanaan program kegiatan transportasi dalam RITJ yang tidak termasuk dalam rencana umum dan rencana program kegiatan transportasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- g. Penyiapan bahan usulan regulasi dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- h. Pemberian rekomendasi penataan ruang yang berorientasi angkutan umum massal.
- i. Pemberian perizinan angkutan umum yang melampaui batas provinsi di wilayah Jabodetabek dan pemberian rekomendasi untuk angkutan terusan (*feeder service*).
- j. Pementauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana umum serta program pengembangan dan pelayanan transportasi yang terintegrasi di wilayah Jabodetabek.
- k. Melakukan koreksi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RITJ yang dilakukan oleh instansi, operator, dan pihak lainnya.
- l. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

B. Struktur Organisasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Susunan organisasi BPTJ sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi BPTJ Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Unit Kerja Eselon II mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis, dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BPTJ. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana dan program, pelaksanaan anggaran, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta evaluasi dan pelaporan;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dokumentasi dan sosialisasi peraturan, penyusunan perjanjian dan kerjasama antar lembaga, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum;

- c. Penyiapan pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, administrasi perkantoran, kearsipan serta urusan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan umum;
 - d. Penyiapan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, komunikasi dan informasi publik, edukasi, publikasi dan dokumentasi, serta pelayanan informasi dan dokumentasi.
2. **Direktorat Prasarana**
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat, perkeretaapian, serta integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat di wilayah Jabodetabek;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek;
 - c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek.
3. **Direktorat Lalu Lintas**
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat, lalu lintas transportasi perkeretaapian, serta pengembangan sistem dan informasi transportasi di wilayah Jabodetabek. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi darat di wilayah Jabodetabek;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas transportasi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek;
 - c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, pembangunan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan informasi di wilayah Jabodetabek.

4. Direktorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan regulasi dan kebijakan, pembiayaan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang, angkutan barang, serta pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di wilayah Jabodetabek;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di wilayah Jabodetabek;
 - c. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, penyiapan usulan kebijakan, pengelolaan, fasilitasi teknis, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendanaan dan pengawasan angkutan di wilayah Jabodetabek.

C. Komposisi Pegawai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam berjalannya suatu organisasi. BPTJ tercatat memiliki pegawai sebanyak 559 pegawai yang tersebar di 1 unit Eselon I, 4 unit Eselon II, dan 13 Eselon III.

1. SDM Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Berdasarkan Komposisi ASN dan Pegawai Honorer

Dalam menjalankan tugasnya, pada tahun 2022 Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek didukung oleh 542 Pegawai, yang terdiri dari 276 PNS, 124 PPNP, 33 Caraka, 47 Pramubakti, 48 Security, dan 14 Pengemudi, dengan komposisi sebagai berikut:

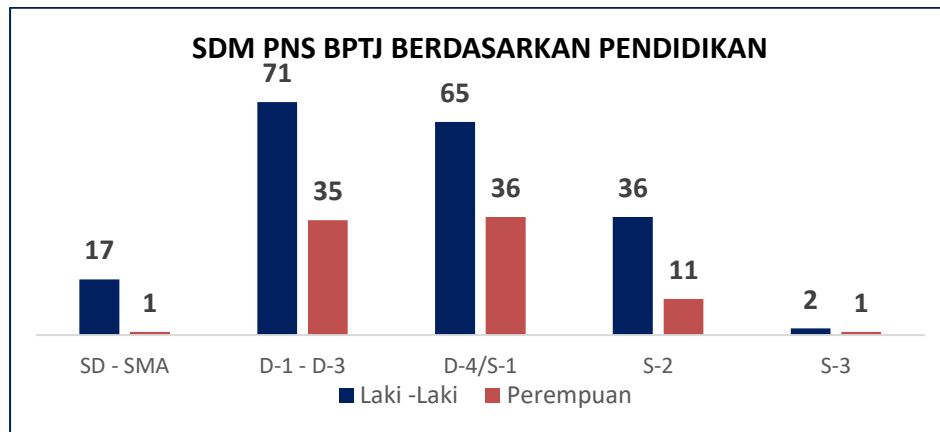
Tabel 1. 1 Komposisi ASN dan Pegawai Honorer

Unit Kerja	PNS	PPNP	Caraka	Pramubakti	Security	Pengemudi
Sekretariat	55	25	5	10	4	13
Dit. Prasarana	48	17	3	0	0	0
Dit. Lalu Lintas	50	8	7	0	0	0
Dit. Angkutan	47	16	7	1	0	0
T. Pondok Cabe	13	10	1	8	9	0
T. Jatijajar	23	19	3	11	13	1
T. Poris Plawad	18	11	3	10	12	0
T. Baranangsiang	22	18	4	7	10	0
TOTAL	276	124	33	47	48	14

Sumber Bagian SDM BPTJ Tahun 2022

2. SDM PNS Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Berdasarkan Pendidikan

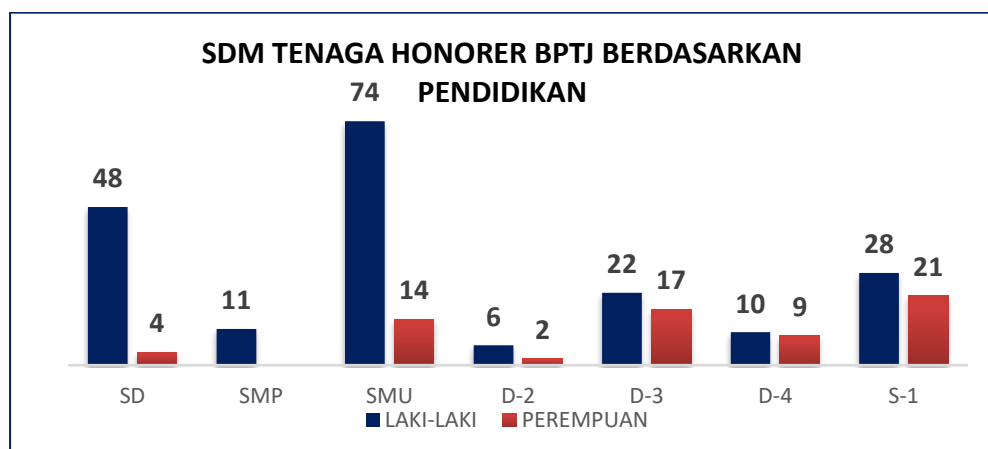
Pada tahun 2022, PNS yang ada dalam Unit Kerja BPTJ memiliki background Pendidikan yang berbeda-beda, dapat dilihat pada grafik tabel ada beberapa jenjang Pendidikan yang ada pada PNS di BPTJ yaitu, SMA sejumlah 18 pegawai, D1-D3 berjumlah 106 pegawai, D4-S1 101 pegawai, S2 sebanyak 48 pegawai, dan yang paling tinggi adalah S3 yaitu sebanyak 3 pegawai. Dalam hal ini tercatat bahwa BPTJ memiliki pegawai PNS yang paling banyak lulusan D1-D3 yaitu sebanyak 106 pegawai.



Gambar 1. 2 Komposisi PNS Jenjang Pendidikan
Sumber Bagian SDM BPTJ Tahun 2022

3. SDM Tenaga Honorer Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Berdasarkan Pendidikan

Pada Tahun 2022, Tenaga Honorer yang ada dalam BPTJ memiliki Background Pendidikan yang berbeda-beda, dapat dilihat pada grafik tabel ada beberapa jenjang Pendidikan yang ada pada Tenaga Honorer di BPTJ yaitu, SD-SMA sejumlah 151 pegawai, D2-D3 sejumlah 47 pegawai, dan D4-S1 berjumlah 68 pegawai.



Gambar 1. 3 Komposisi Tenaga Honorer Jenjang Pendidikan
Sumber Bagian SDM BPTJ Tahun 2022

D. Visi dan Misi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Dalam menjalankan tugas nya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai visi dan misi. Visi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BPTJ 2020-2024, yaitu “Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek yang berupaya mewujudkan Konektivitas Jabodetabek yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.” dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang professional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan; dan
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif.

E. Sejarah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

BPTJ dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang diundangkan pada 22 September 2015. Latar belakang dibentuknya BPTJ adalah bahwa penanganan masalah transportasi Jabodetabek selama ini terkendala oleh kondisi daerah yang berbeda satu sama lain. Selain itu BPTJ dibentuk dengan tujuan untuk dapat mengatur transportasi di Jabodetabek dengan lebih baik. BPTJ resmi berkantor di Jalan MT. Haryono Kav.45- 46 Jakarta Selatan. Bapak Menteri Perhubungan, Ignasius Jonas pada Tanggal 11 Mei tahun 2016, dihadiri Pejabat dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten (Bupati/Walikota di wilayah Jabodetabek), para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Jabodetabek, para operator angkutan umum dan *stakeholders* lain yang terkait. Pada Tahun 2021 BPTJ menempati kantor di Gedung Karya Lantai 15 dan 16 Kementerian Perhubungan Jalan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat.

BAB II KILAS KINERJA BPTJ TAHUN 2022**A. Peristiwa Penting****1. Rapat Koordinasi BPTJ Tahun 2022 dengan Tema "Sinkronisasi Pengelolaan Transportasi Jabodetabek"**

Telah dilaksanakan Rapat koordinasi BPTJ pada tanggal 14 Januari 2022 di Ciawi, dengan tema "Sinkronisasi Pengelolaan Transportasi Jabodetabek". Rapat dibuka oleh Plt. Kepala BPTJ, Bapak Budi Setiyadi, serta dihadiri oleh pihak eksternal maupun pihak internal Kementerian Perhubungan. Pihak eksternal diwakili oleh pejabat maupun staf dari Gubernur Provinsi (DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat), Walikota/Bupati se-Jabodetabek, Bappeda dan Dinas Perhubungan se-Jabodetabek, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kementerian Dalam Negeri, serta Kepolisian RI. Pihak internal Kementerian Perhubungan diwakili oleh pejabat maupun staf dari KNKT, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan internal BPTJ.

Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini BPTJ Kementerian Perhubungan adalah memperkuat koordinasi dengan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Kementerian Dalam Negeri dalam rangka melakukan sinkronisasi aktif dengan Pemerintah Daerah se-Jabodetabek dalam pengelolaan Transportasi, khususnya penindakan ODOL, penyediaan layanan BTS, dan penyediaan fasilitasi teknis alat perlengkapan jalan.



Gambar 2. 1 Rapat Koordinasi BPTJ 2022 yang bertemakan "Sinkronisasi Pengelolaan Transportasi Jabodetabek"

2. Rapat Koordinasi BPTJ

Pada Tanggal 21 Juli 2022, BPTJ menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan) di wilayah Jabodetabek. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta mengharmonisasikan dan mengkolaborasikan strategi dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan transportasi di wilayah Jabodetabek dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Dalam rapat koordinasi ini ada beberapa isu dan permasalahan yang disampaikan dan perlu segera ditindaklanjuti yaitu:

- Terkait pembangunan *Skybridge* Bojonggede. Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran pemeliharaan untuk tahun 2023 namun sifatnya masih perkiraan. Pemerintah Kabupaten Bogor mengharapkan segera mendapatkan rincian komponen pemeliharaan dari BPTJ agar anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan
- Terkait RIT (Rencana Induk Transportasi) Kabupaten Bogor, diharapkan perencanaan BPTJ (RITJ) dapat sinkron dan saling bersinergi
- Untuk keberlanjutan pembangunan *underpass* Bojonggede, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mendukung terkait pembebasan lahannya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



gambar a



gambar b

Gambar 2. 2 a dan b Rapat Koordinasi Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek

3. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) VI KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2022

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-51, BPTJ diundang oleh Gubernur Sumatera Barat dan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, untuk menghadiri Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) VI KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 12 November 2022 yang diikuti oleh 80 Kafilah (Kementerian/Lembaga 34 Provinsi). Kementerian Perhubungan Mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti kegiatan 18 cabang yang dilombakan. Kegiatan MTQ ini dilaksanakan di Kota Padang yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri.



Gambar a



Gambar b

Gambar 2. 3 a dan b Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ VI KORPRI Tingkat Nasional Tahun 2022)

B. Penghargaan BPTJ Tahun 2022

Maksud Program BTS ini dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan Pengembangan Transportasi dengan Kerangka Transportasi Berkelanjutan dalam segi ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam hal pelayanan angkutan umum yang berperan sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya meminimalisir biaya transportasi penduduk dan menurunkan polusi dari penggunaan kendaraan pribadi.

Program BTS ini dilakukan dengan membeli layanan (memberikan subsidi 100%) dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pada tahun 2022, program BTS telah dilaksanakan di Kota Bogor, Jawa Barat dengan melayani 4 trayek sebagai berikut:

- Koridor 1 Terminal Bubulak – baranangsiang/Cidangiang
- Koridor 2 Terminal Bubulak – Ciawi
- Koridor 5 Ciparigi – Stasiun KA Bogor
- Koridor 6 Air Mancur – Praung Banteng



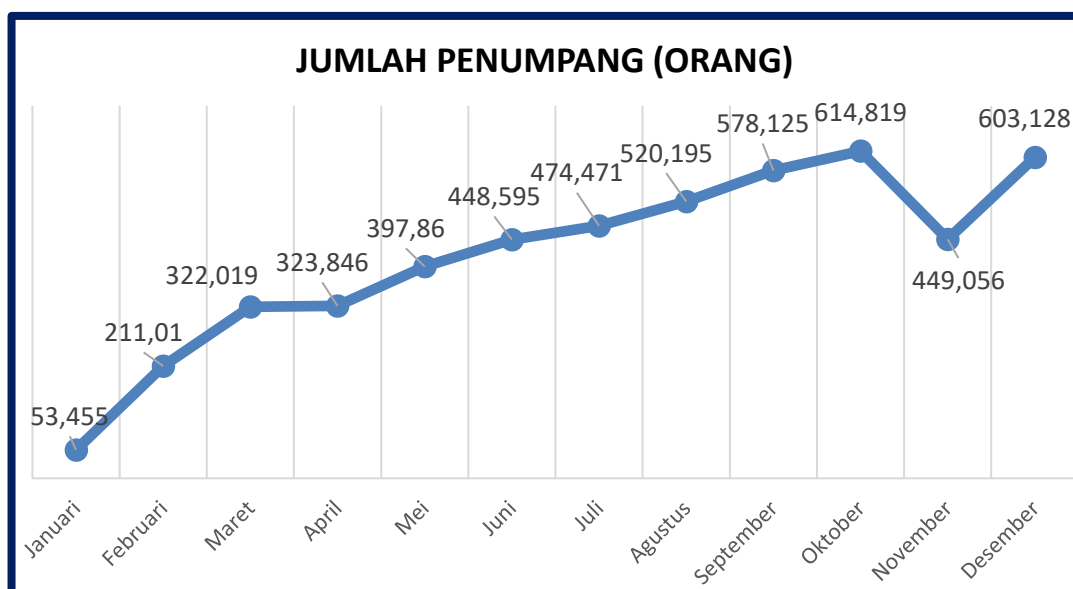
gambar a



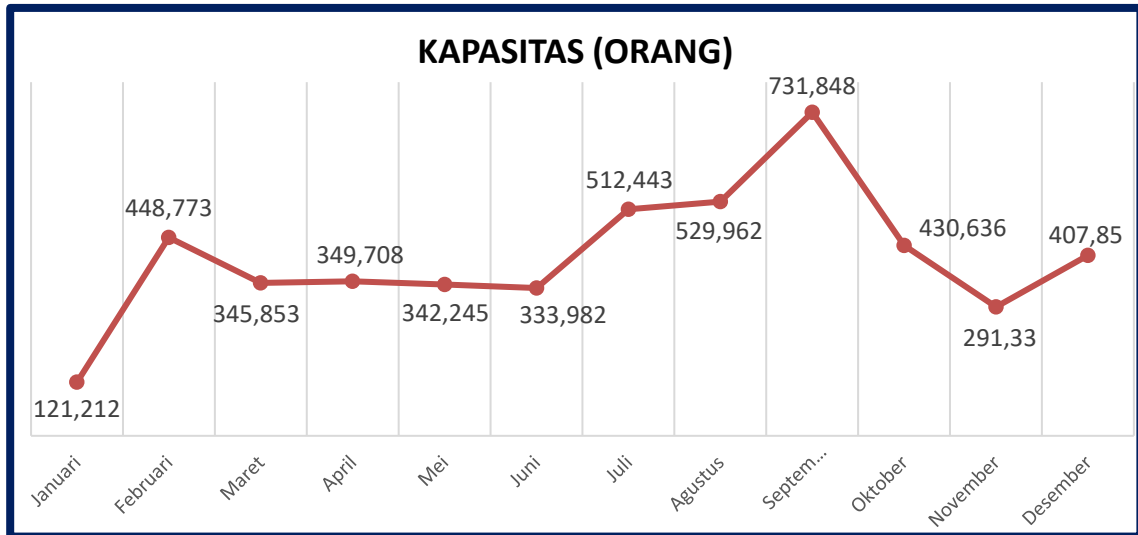
gambar b

Gambar 2. 4 a dan b Program Subsidi Bus Buy The Service (BTS) Kota Bogor

Operasional BTS didukung oleh penerapan teknologi informasi setiap unit bus dilengkapi dengan peralatan Internet of Things (IoT) seperti passenger counting, GPS tracking, dan camera surveillance. Sistem ini berguna untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional BTS agar layanan angkutan umum Kota Bogor ini dapat berjalan dengan optimal. Guna memudahkan masyarakat dalam mengetahui headway atau jarak kedatangan maupun keberangkatan antar unit bus, akan disediakan pula aplikasi khusus untuk para pengguna.



gambar a



gambar b

Gambar 2. 5 a dan b Data Produksi Layanan Buy The Service (BTS) Kota Bogor

Layanan Buy The Service (BTS) BISKITA TRANSPAKUAN dari BPTJ di Kota Bogor berhasil meraih predikat sebagai transportasi publik ramah anak dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor.



Gambar 2. 6 Penghargaan Layanan Transportasi Publik Ramah Anak

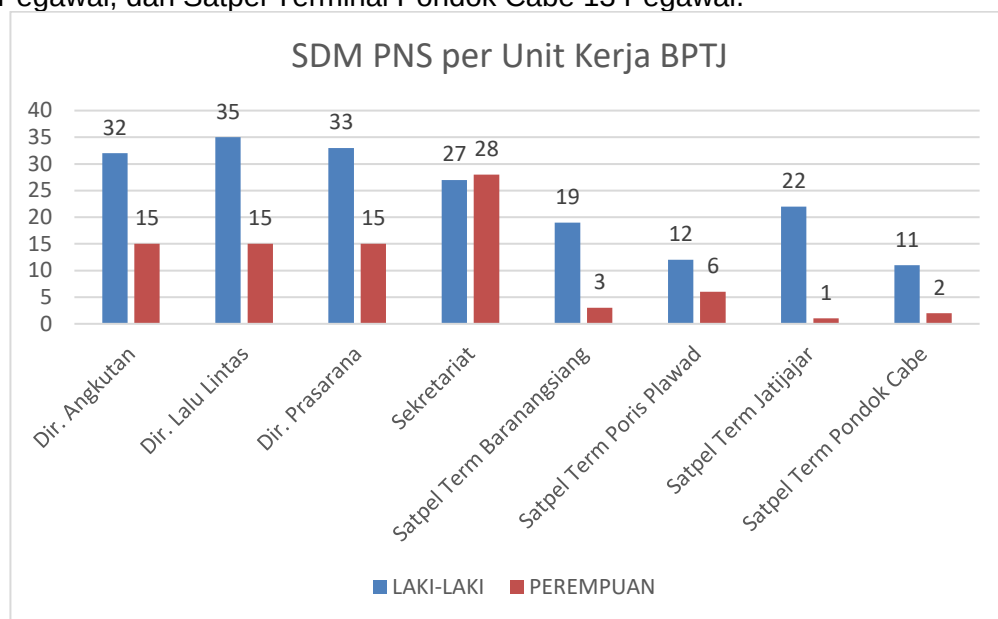
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA BPTJ

A. Profil SDM BPTJ

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek per tahun 2022 memiliki pegawai berjumlah 542 pegawai. Dari masing masing unit kerja eselon 2 yaitu Sekretariat, Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Angkutan, dan Direktorat Prasarana.

1. SDM PNS BPTJ Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram dibawah ini Sekretariat di berjumlah total laki-laki dan perempuan 55 pegawai, Direktorat Lalu Lintas 50 Pegawai, Direktorat Angkutan 47 Pegawai, Direktorat Prasarana 48 Pegawai, Satpel Terminal Baranangsiang 22 Pegawai, Satpel Terminal Poris Plawad 18 Pegawai, Satpel Terminal Jatijajar 23 Pegawai, dan Satpel Terminal Pondok Cabe 13 Pegawai.

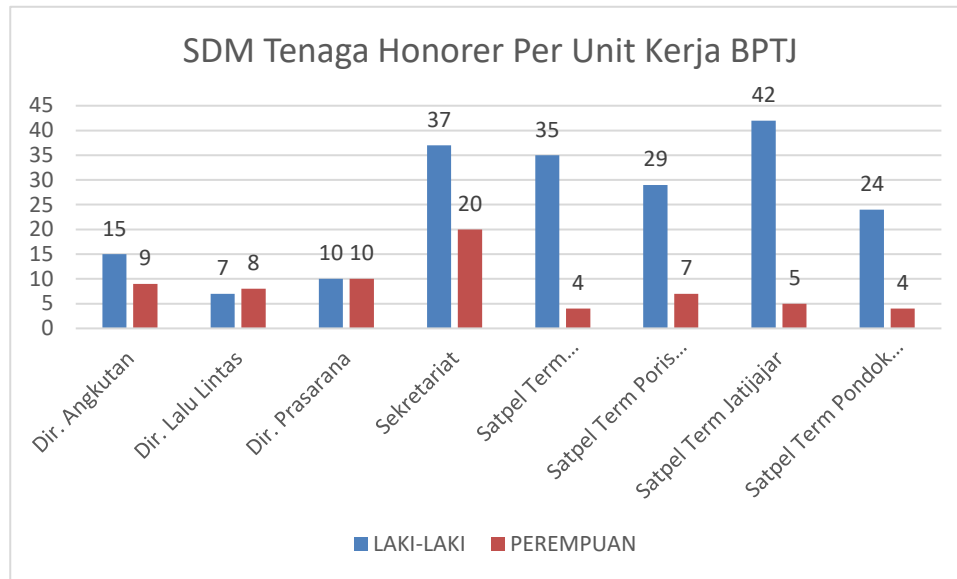


Gambar 3. 1 Jumlah SDM PNS per Unit Kerja BPTJ

Sumber Bagian SDM BPTJ Tahun 2022

2. SDM Tenaga Honorer BPTJ Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin

Berdasarkan diagram dibawah ini SDM tenaga honorer berjumlah total laki-laki dan perempuan di Sekretariat adalah 57 Pegawai, Direktorat Lalu Lintas 15 Pegawai, Direktorat Angkutan 174, dan Direktorat Prasarana 20 Pegawai.

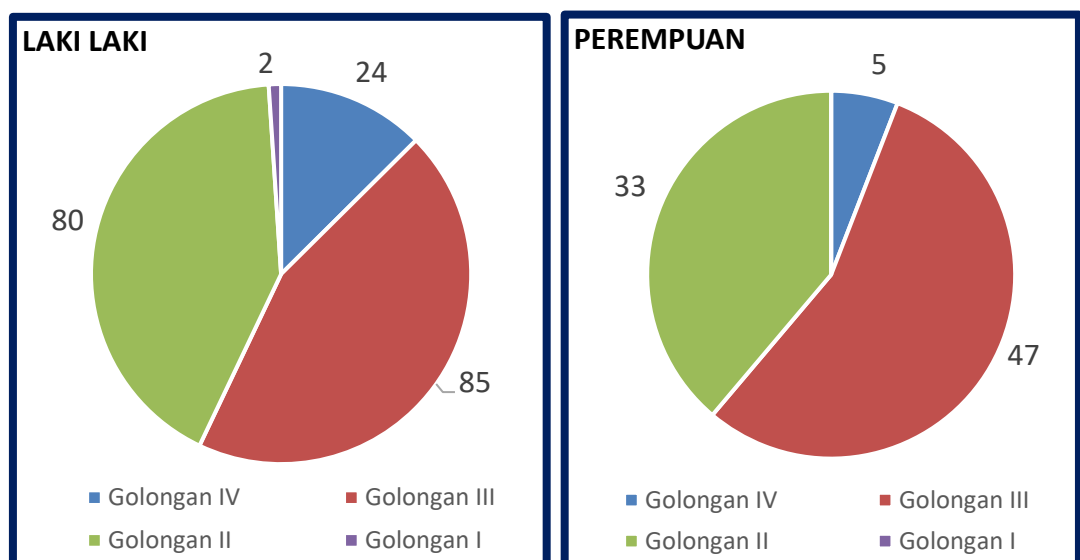


Gambar 3. 2 Jumlah SDM Tenaga Honorer per Unit Kerja BPTJ

Sumber Bagian SDM BPTJ Tahun 2022

3. Jumlah Pegawai BPTJ Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Dapat dilihat BPTJ memiliki PNS dengan golongan yang berbeda, dari masing masing Laki-laki dan perempuan. Laki laki terdapat 2 pegawai dengan Golongan I sedangkan perempuan tidak ada, Laki laki dengan Golongan II terdapat 80 Pegawai sedangkan perempuan terdapat 33 pegawai, Golongan III terdapat 85 Pegawai Laki-laki sedangkan perempuan terdapat 47 pegawai, dan Golongan IV terdapat 24 pegawai laki-laki dan 5 pegawai perempuan.



Gambar 3. 3 Pegawai BPTJ Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Sumber Bagian SDM BPTJ Tahun 2022

B. Pengelolaan SDM BPTJ**1. Sosialisasi Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai tindak lanjut diterbitkannya Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/I/2022 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2022 di Jakarta.

Tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja periode januari s.d. juni 2021;
- b. Penyusunan sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja PNS periode juli s.d. Desember;
- c. Penilaian kinerja PNS tahun 2021



Gambar 3. 4 Dokumentasi Finalisasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja SDM ASN

2. Kegiatan Koordinasi Kelembagaan Dan Inventarisasi Pembentukan Tata Kelola Pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pondok Cabe

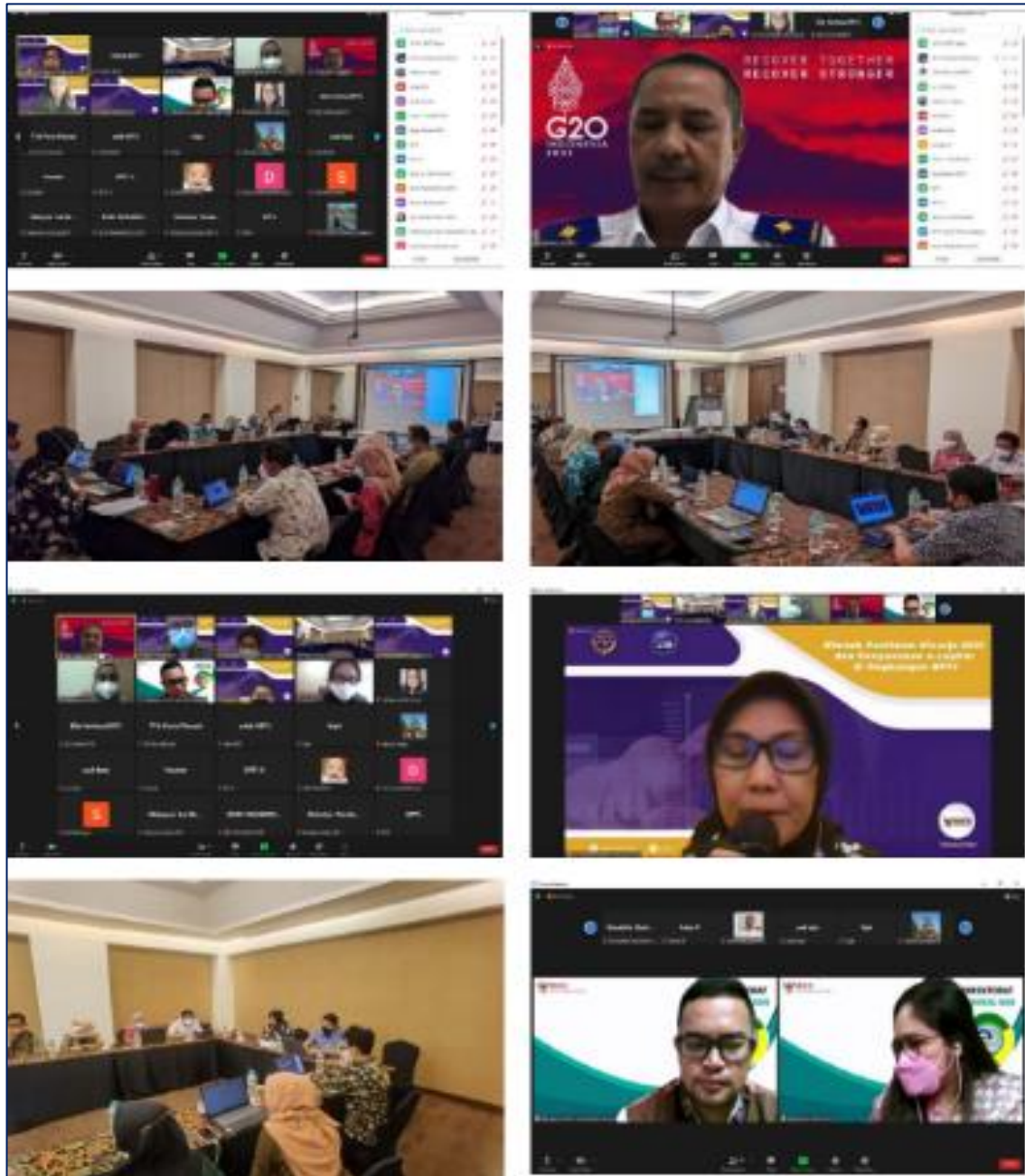
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 5 Maret 2022 yang dilaksanakan di Satuan Pelayanan Terminal Pondok Cabe. Dalam rangka melakukan koordinasi kelembagaan dan inventarisasi pembentukan Tata Kelola Pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pondok Cabe dari sisi Kinerja Pelayanan, Kinerja Operasional Terminal, dan Kinerja SDM



Gambar 3. 5 Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Kelembagaan dan Inventarisasi Pembentukan Tata Kelola Pada Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Pondok Cabe

C. Peningkatan Kapasitas SDM BPTJ

Telah dilaksanakan Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis di Lingkungan BPTJ. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensi pegawai di Lingkungan BPTJ yang bertujuan untuk membentuk tim kerja yang efektif dan menciptakan Teknik komunikasi dalam mencapai target kinerja pada setiap unit.



Gambar 3. 6 Dokumentasi Bimbingan dan Bantuan Teknis (Bimtek) Penilaian Kinerja

D. Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Pelaksanaan apel dilakukan pada setiap hari senin pagi pukul 09.00 WIB di lingkungan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek



Gambar 3. 7 Pelaksanaan Apel Pagi di Lingkungan BPTJ

BAB IV KEGIATAN STRATEGIS**A. Peristiwa Penting, berskala nasional dan/atau internasional****1. Pembangunan Skybridge dari Terminal Bojong Gede ke Stasiun Bojong Gede**

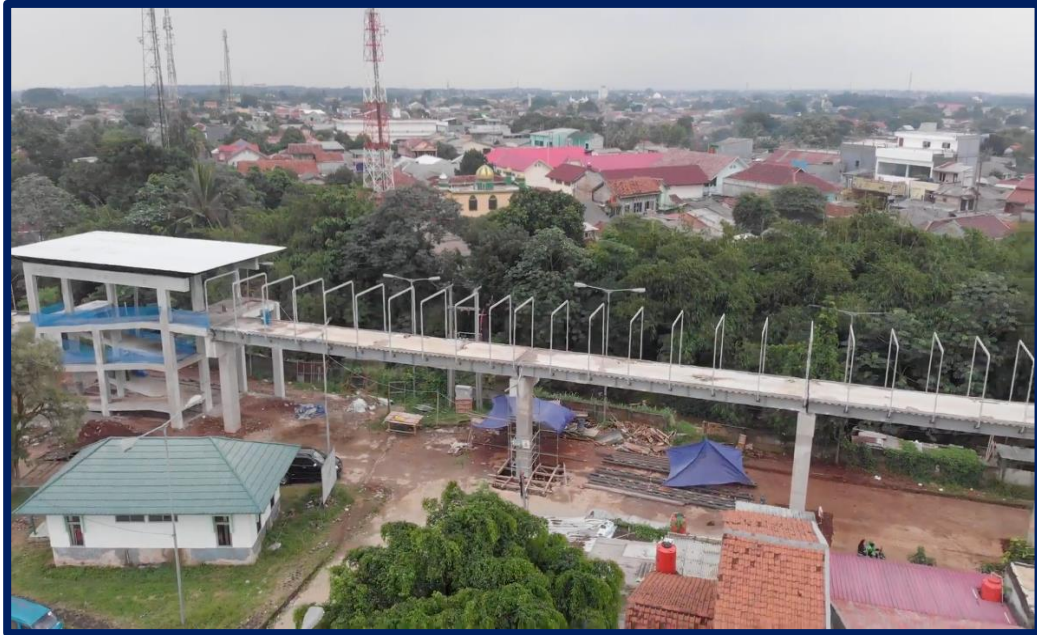
Skybridge Bojonggede menghubungkan antara Stasiun Bojonggede dengan Terminal Penumpang Tipe C Bojonggede dengan panjang 243m. Skybridge dibangun untuk mengintegrasikan Stasiun dengan terminal sehingga memberikan kemudahan masyarakat dalam berpindah moda dan untuk mengurangi kemacetan serta kesemrawutan di depan Stasiun Bojonggede.



gambar a



gambar b



gambar c



gambar d

Gambar 4. 1 a, b, c, dan d Pembangunan Skybridge Bojonggede

Pembangunan dilakukan di atas tanah milik Pemda Kab. Bogor. Sehingga setelah pembangunan selesai bangunan *Skybridge* akan dihibahkan ke Pemda Kab. Bogor. Saat ini skybridge sedang dalam progres pembangunan dan direncanakan akan selesai pada tahun 2023. Selain itu direncanakan akan dibangun park and ride di Terminal Bojonggede dengan dana Hibah dari Pemprov DKI Jakarta

2. Fasilitas Teknis Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan di Jabodetabek

Pada tahun 2022 BPTJ melakukan kegiatan Fasilitas Teknis Sistem Keselamatan yang merupakan salah satu amanah dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang diimplementasikan dalam kegiatan BPTJ. Fasilitas teknis sistem keselamatan dan keamanan transportasi dilaksanakan dalam bentuk pengadaan dan pemasangan alat fasilitas keselamatan di ruas jalan di wilayah Jabodetabek oleh BPTJ yang kedepannya akan diserahkan kepada Pemda berikut pengelolaan dan pemeliharannya. Alat keselamatan transportasi yang dibangun berupa rambu over head, lampu penerangan jalan umum (LPJU) listrik, marka jalan, dan *warning light solar cell*



Gambar 4. 2 Fasilitas Teknis Fasilitas Keselamatan dan Keamanan

Tabel 4. 1 Fasilitas Teknis Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan Tahun 2022

No	Ruas Jalan Nasional	Rambu Overhead	Warning Light	APJ	Marka (m')
1.	Ruas Jalan Batas Depok Bogor (Kode Ruas 012)	10	2	30	30,531
2.	Ruas Jalan Nasional Batas Jasinga, Jl. Raya Leuwiliang (Kode Ruas 022)	9	2	24	-
3.	Ruas Jalan Cigelug (Batas Banten) - Jasinga (Kode Ruas 021)	11	2	24	31,503
4.	Ruas Jalan Raya Bogor (Gandaria, Batas DKI Jakarta - Kedunghalang Batas Bogor) (Kode Ruas 072 073)	9	2	24	38,149
5.	Ruas Jalan Kabupaten Bekasi,	11	2	24	30,071

No	Ruas Jalan Nasional	Rambu Overhead	Warning Light	APJ	Marka (m')
	Cikarang (Batas Kab. Bekasi - Kab. Karawang) (Kode Ruas 002 dan 003)				
6.	Ruas Jalan Kota Bekasi (Batas DKI Jakarta - Kota Bekasi) (Kode Ruas 001)	5	1	29	30,515
7.	Ruas Jalan Ciawi - Puncak (Kode Ruas 074)	22	2	34	24,750
8.	Jalan di Ruas Jalan Raya Transyogi (Kode Ruas 097); Jalan Letda Natsir (Kode Ruas 097); dan Jalan Raya Cimanggis - Nagrak (Kode Ruas 097)	22	4	28	25,398
9.	Ruas Jalan Raya Serang (Batas Kota Serang-Batas Kota Tangerang) (Kode Ruas 003)	-	-	-	43,371
10.	Ruas Jalan Nasional Wilayah Kota Tangerang (Kode Ruas 003 & 004)	-	-	-	38,149
Total		99	17	217	292,437

3. Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg, Kota Depok

Stasiun Pondok Rajeg Kota Depok berada pada jaringan lintas Citayam-Nambo. Pekerjaan reaktivasi stasiun yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan Angkat Track Jalan KA (Kelandaian emplasemen 1.15 ‰ dan di lintas 9.5‰)
2. Pekerjaan Penyesuaian Ketinggian Jaringan LAA.
3. Pekerjaan Struktur Peron (peron sepanjang 240 m untuk memenuhi SF 12)
4. Pekerjaan Struktur Bawah Gedung Stasiun.



Gambar 4. 3 Rencana Rancangan Stasiun Pondok Rajeg



Gambar a



Gambar b

Gambar 4. 4 a dan b Kondisi setelah pengangkatan peron bawah



Gambar 4. 5 Pengangkatan Listrik Aliran Atas

Pada tahun 2022 Telah dilaksanakan pembongkaran aset Stasiun Pondok Rajeg (BA-BPTJ 12 Tahun 2022) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2022. Aset yang telah dilakukan pembongkaran diserahkan kepada BTP Jakban di Gudang Perkeretaapian BTP Wilayah Jakarta dan Banten pada tanggal 22 Juni 2022 (BA-BPTJ 22 Tahun 2022). Selain itu juga telah dilaksanakan pemasangan material LAA. Kemudian telah dilakukan pekerjaan peron sepanjang 240 titik dimulai dari STA 41+292 sampai dengan STA 41+532. Kegiatan reaktivasi stasiun ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2023.

B. Kegiatan BPTJ Dalam Menunjang Program Kerja Presiden

1. Padat Karya

Padat Karya merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada terminal Tipe A yang di Kelola BPTJ dalam menunjang program kerja Presiden. Tujuan Padat Karya ini adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat. Program padat karya ini merupakan salah satu arahan dari Presiden RI untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, Program ini merujuk dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Padat Karya di Lingkungk Kementerian Perhubungan. Program padat karya ini dalam sektor transportasi sendiri itu terdiri dari pembangunan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi.



Gambar 4. 6 Kegiatan Padat Karya di Terminal Baranangsiang
Sumber. Terminal Tipe A Baranangsiang



Gambar 4. 7 Kegiatan Padat Karya di Terminal Jatijajar
Sumber. Terminal Tipe A Jatijajar



Gambar 4. 8 Kegiatan Padat Karya di Terminal Pondok Cabe
Sumber. Terminal Tipe A Pondok Cabe



Gambar 4. 9 Kegiatan Padat Karya di Terminal Poris Plawad

Sumber. Terminal Tipe A Poris Plawad

BAB V SARANA

A. Alat Angkutan Bermotor

BPTJ memiliki BMN berupa angkutan bermotor yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional dan fungsional, seperti kegiatan survei lapangan, kegiatan pengawasan lalu lintas posko Natal dan Tahun Baru (acara/kegiatan khusus), serta kegiatan teknis lainnya.

Tabel 5. 1 Data Alat Angkutan Bermotor

Alat Angkutan Bermotor	Jumlah	Keterangan
Jeep	7	Nissan, Pajero, Navara
Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	3	Mitsubishi, Hyundai
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	28	Honda, Toyota Avanza, Nissan
Pick Up	9	Nissan, Mitsubishi, Mobil Single Cabin
Sedan	5	Toyota, Honda, Nissan
Sepeda Motor	18	Honda, Yamaha, Kawasaki, Xmax



Gambar 5. 1 Sampel Dokumentasi Alat Angkutan Bermotor di lingkungan BPTJ

Sumber: Data Bagian Perencanaan dan Keuangan (BMN)

B. Fasilitas Keselamatan di Wilayah Jabodetabek

Pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan di wilayah Jabodetabek meliputi perlengkapan jalan berupa Rambu Overhead, Marka Jalan, *Warning Light*, dan Alat Penerangan Jalan

Tabel 5. 2 Data Perlengkapan Jalan di Wilayah Jabodetabek tahun 2017 s.d. 2022

Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Realisasi s.d. 2021	Realisasi Tahun 2022	Total
Rambu Overhead	Unit	1.395	99	1.494
Warning Light	Unit	324	17	341
Alat Penerangan Jalan	Unit	2.451	217	2.668
Marka Jalan	Meter'	949.560	292.437	1.241.997



Gambar 5. 2 Warning Light di Jalan Raya Ciawi – Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Gambar 5. 3 Rambu Overhead di Jalan Raya Ciawi – Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat



Gambar 5. 4 Alat Penerangan Jalan di Jalan Raya Transyogi, Jalan Letda Natsir, Jalan Raya Cimanggis – Nagrak



Gambar 5. 5 Marka Jalan di Kabupaten Bekasi, Cikarang (Kab. Bekasi - Kab. Karawang)

C. Area Traffic Control System (ATCS)

ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan.

Fungsi ATCS sebagai berikut:

- Pengaturan Lalulintas
Mengatur waktu sinyal di persimpangan secara responsif dan terkoordinasi
- Prioritas Jalur
Memberikan waktu hijau pada kendaraan yang memiliki prioritas (Mobil Damkar, Ambulance, Kendaraan kenegaraan, konvoi untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan kepolisian RI) dalam keadaan tertentu
- Informasi
Menyampaikan informasi kondisi lalu lintas dan alternatif lintasan jika terjadi kemacetan (penumpukan kendaraan pada ruas jalan)
- Pemantauan
Pemantauan lalulintas melalui kamera di setiap persimpangan serta rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan.

Sampai dengan tahun 2022, ATCS milik BPTJ terpasang pada 79 titik simpang.

BEKASI	DEPOK	KOTA BOGOR	KABUPATEN BOGOR	KOTA TANGERANG
1. SIMP. TOL TIMUR 2. SIMP. PRESDO 3. SIMP. PONCOL 4. SIMP. PEKAYON 5. SIMP. WAHHAB AFFAN 6. SIMP. KRANUI 7. SIMP. PERUMNAS 8. SIMP. PEMDA 9. SIMP. KAYURINGIN 10. SIMP. TOLL BARAT 11. SIMP. RAWA PANJANG 12. SIMP. BCP 13. SIMP. JUANDA - KARTINI 14. SIMP. RAWA SEMUT 15. SIMP. KELUAR TERMINAL 16. SIMP. MASUK TERMINAL 17. SIMP. BULAK KAPAL 18. SIMP. BANK JABAR 19. SIMP. LOTTE MART 20. SIMP. SMP 2 UNISMA 21. SIMP. KALI ABANG 22. SIMP. SINDE 23. SIMP. KOMPAS 24. SIMP. EXIT TOL CIBITUNG 25. SIMP. WARUNG BONGKOK 26. SIMP. SGC 27. SIMP. TAMAN KOTA KALIULU	1. SIMP. JATI JAJAR 2. SIMP. JUANDA RAYA BOGOR 3. SIMP. SILIWANGI 4. SIMP. RAMANDA 5. SIMP. MARGONDA 6. SIMP. ALHUDA 7. SIMP. CILODONG (PTZ) 8. SIMP. PAL UI 9. SIMP. BOJONG SARI 10. SIMP. SENGON 11. SIMP. PLN 12. SIMP. PENGASINAN	1. SIMP. BANGBARUNG 2. SIMP. PANDU 3. SIMP. MARWAN 4. SIMP. BARANANG SIANG 5. SIMP. TUGU KUJANG 6. SIMP. PANGRANGO 7. SIMP. TALANG 8. SIMP. POMAD 9. SIMP. BORR 10. SIMP. WARUNG JAMBU 11. SIMP. LIPPO PLAZZA 12. SIMP. EKALOSE 13. SIMP. YASMIN 14. SIMP. SEMPLAK 15. SIMP. SBJ 16. SIMP. BUBULAK 17. SIMP. LALADON 18. SIMP. ASPOL	1. SIMP. SENTUL 2. SIMP. PDAM 3. SIMP. RSUD 4. SIMP. BDB 5. SIMP. KARADENAN 6. SIMP. PENGADILAN 7. SIMP. PASIR JAMBU 8. SIMP. BAMBU KUNING 9. SIMP. PEMDA 10. SIMP. CIBINONG 11. SIMP. CIKARET 12. SIMP. CIAWI 13. SIMP. GADOK 14. SIMP. PM 15. SIMP. IPB 16. SIMP. SALABENDA 17. SIMP. TERMINAL PARUNG 18. SIMP. POLSEK JASINGA 19. SIMP. CIGUDEG	1. SIMP. BATU CEPER 2. SIMP. PUSPEM 3. SIMP. BENTENG BETAWI 4. SIMP. TANAH TINGGI 5. SIMP. TMP TARUNA 6. SIMP. BENDA (PTZ) 7. SIMP. PLN 8. SIMP. GRENDENG 9. SIMP. JATIUNGUNG KABUPATEN TANGERANG 1. SIMP. TIGARAKSA 2. SIMP. CITRA RAYA 3. SIMP. BITUNG 4. SIMP. CIBADAK/CANGKUDU 2 5. SIMP. CIBADAK (PTZ) 6. SIMP. 3 MANIS 7. SIMP. 4 GAJAH TUNGGAL/JATAKE 8. SIMP. 4 CIMONE 9. SIMP. PADJAJARAN KOTA TANGERANG SELATAN 1. SIMP. SITU GINTUNG 2. SIMP. GAPLEX 3. SIMP. UIN

Warna biru = Milik BPTJ (79)
Warna hitam = Milik Daerah (18)

Gambar 5. 6 Koridor ATCS di Jabodetabek s.d. tahun 2022

Adapun kelengkapan perangkat utama ATCS sebagai berikut:

- Control camera (camera counting), Speed Detector digunakan untuk membaca kondisi kecepatan kendaraan melalui rotasi roda, dan melakukan counting untuk mengetahui Jumlah kendaraan perhari lalu Informasi diberikan kepada ATCS
- Variable Message Sign (VMS), digunakan untuk menyampaikan informasi peringatan, larangan perintah dan petunjuk
- Public Announcer
- Traffic Light (Apill), lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (zebra cross), dan tempat arus lalu lintas lainnya

CCROOM	LAPANGAN
Software : 1. Aplikasi CCTV CLIENT 2. Aplikasi TRAFFIC CLIENT 3. Aplikasi NTMC 4. Aplikasi WALLDISPLAY 5. Aplikasi Record 6. Aplikasi Video Conference 7. Aplikasi VMS 8. Aplikasi Detektor Hardware : 1. Server 2. Komputer 3. Mic Announcer 4. Telephone Koordinasi antar CCROOM Daerah 5. Narrow Bazzel (Layar) 6. UPS 7. Sound System 8. Telepon	Hardware : 1. Lampu APILL 2. Tiang APILL (Siku dan Pendek) 3. Kamera FIX (CCTV) 4. Kamera PTZ (CCTV) 5. Kamera Detector 6. Tiang Kamera Detektor (Siku) 7. Variable message System (VMS) 8. Tiang Kamera PTZ 9. Kabel FO 10. Kontrol Box 11. Tiang kabel FO 12. Speaker 13. Display Information System 14. Delineator (Patok pengaman)

Gambar 5. 7 Perangkat ATCS



Gambar 5. 8 Dokumentasi Traffic Light dan Camera/Detector



Gambar 5. 9 Variable Message Sign (VMS)

BAB VI PRASARANA

Gedung kantor BPTJ berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat, Gedung Karya Lantai 15 dan 16. Selain itu BPTJ memiliki Bangunan Terminal sebagai berikut:

A. Terminal Tipe A Pondok Cabe

Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe diresmikan tanggal 31 Desember 2018 oleh Kepala BPTJ dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Terminal ini terletak di Jalan Kemiri Raya, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Terminal Pondok Cabe memiliki luas 25.995 m². Terdiri dari bangunan utama seluas 2.550 m². Terminal Bus Antar Kota (zona pengendapan) seluas 2.500 m² ditambah 2.870 m² serta 1.800 m² untuk lahan terminal. Terminal Penumpang Tipe A Pondok Cabe dapat melayani angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dengan tujuan kota/kabupaten di Jawa dan Sumatra, serta angkutan bandara atau Jabodetabek Airport Connexion (JAC).



Gambar 6. 1 Gedung Terminal Tipe A Pondok Cabe

B. Terminal Tipe A Jatijajar

Terminal Tipe A Jatijajar terletak di Jl. Raya Bogor No. 37, Jatijajar, Topas, Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas lahan $\pm 103,721 \text{ m}^2$. Terminal ini diresmikan dan dibuka untuk umum oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tanggal 13 Maret 2019. Daerah yang dulunya terdapat pepohonan jati ini dipilih menjadi terminal Kota Depok menurut informasi Bappeda Kota Depok karena posisinya yang strategis yaitu dengan seajarnya tol Cinere - Jagorawi. Pembangunan Terminal Jatijajar ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Jalan Margonda Depok dan Jalan Raya Bogor.



Gambar 6. 2 Gedung Terminal Tipe A Jatijajar

C. Terminal Tipe A Baranangsiang

Terminal Baranangsiang merupakan Terminal penumpang Tipe A yang berada di Kota Bogor. Terminal Baranangsiang berdiri sejak tahun 1974. Lokasinya sangat strategis karena berada tepat di ujung jalan tol pertama Indonesia yaitu tol Jagorawi. Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang terletak di Jalan Pajajaran No.9, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Terminal Penumpang Tipe A Baranangsiang memiliki luas 21.415 m². Terminal ini telah dikelola oleh BPTJ sejak awal tahun 2018.



Gambar 6. 3 Gedung Terminal Tipe A Baranangsiang

D. Terminal Tipe A Poris Plawad

Terminal A Poris Plawad berlokasi di Jalan Benteng Betawi Poris Plawad, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Terminal Tipe A Poris Plawad memiliki luas 19.702 meter persegi yang dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan. BPTJ mengelola pelayanan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang menghubungkan Terminal Tipe A Poris Plawad dengan berbagai kota/kabupaten di Sumatra, Banten, Jawa, Bali, Lombok, dan NTB serta sarana prasarana, pendanaan, dan personel sesuai dari surat pelimpahan. Terminal Tipe A Poris Plawad ini juga melayani angkutan TransJabodetabek dan TransTangerang. Sisanya masih dikelola oleh Pemerintah Daerah Tangerang.



Gambar 6. 4 Gedung Terminal Tipe A Poris Plawad

BAB VII KETERLIBATAN STAKEHOLDER**1. Kegiatan Kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Indonesia dengan Kementerian Pertanian, Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea Di Bidang Transportasi**

- Nota Kesepakatan antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian, Infrastruktur dan Transportasi Republik Korea tentang Implementasi Bantuan Resmi Proyek Pembangunan Sistem Transportasi Cerdas dan Sistem Manajemen Bus (Bus Information Management System).

Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk menetapkan kontribusi dan peran Para Pihak dalam mengembangkan transportasi umum dan penerapan ITS (Sistem Transportasi Cerdas) untuk dilaksanakan oleh Para Pihak di wilayah Republik Indonesia hingga tahun 2023. Proyek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana Induk dan Operasi Percontohan untuk pengembangan Terminal Bus dan Pelaksanaan ITS (Sistem Transportasi Cerdas) di Republik Indonesia.
- 2) Desain dasar dan proyek percontohan untuk BIMS (Sistem Manajemen Informasi Bus) untuk Wilayah Jabodetabek, Indonesia.

Jangka waktu Kegiatan mulai berlaku pada 21 Maret 2022 sampai berakhirnya proyek-proyek yang ada di dalam Nota Kesepakatan.

Hasil Kegiatan yaitu Sinkronisasi pelaksanaan program BIMS dan modernisasi Terminal Kampung Rambutan. Berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pemasangan perangkat BIMS (pemasangan BIMS dan pengelolaan logistik) dan sewa titik reklami di halte.

- *Memorandum of Understanding between the Ministry of Transportation (MOT) of the Republic of Indonesia and the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) of the Republic of Korea Concerning Cooperation In The Field of Transport*

Tujuan dari Memorandum ini adalah dalam rangka untuk mempromosikan kerja sama timbal balik antara kedua belah pihak di bidang transportasi (tidak termasuk transportasi laut) adalah sebagai berikut:

- memfasilitasi kerja sama transportasi antara kedua belah pihak;
- mempromosikan manfaat bersama dengan berbagi informasi, pengalaman, dan teknologi di bidang jalan, kereta api, dan bandara; dan
- untuk memfasilitasi kerja sama antara industri terkait transportasi dan organisasi kedua negara dengan tujuan meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional.

Memorandum ini mulai berlaku sejak 23 Juni 2022 dan akan tetap berlaku selama lima (5) tahun dan setelahnya akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut. Adapun bentuk kegiatan dari memorandum ini adalah:

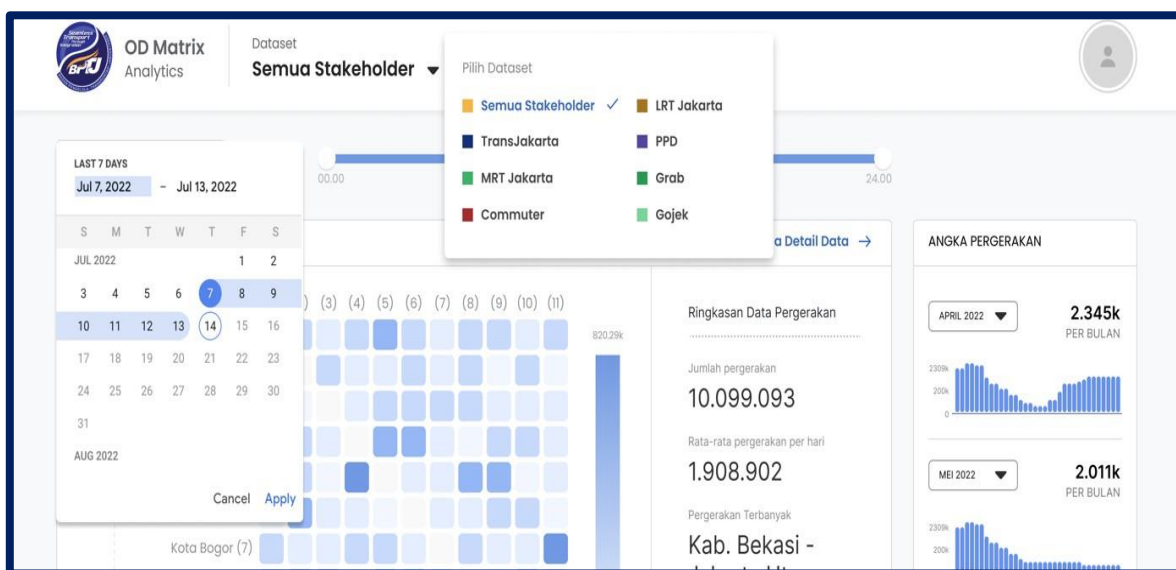
- pertukaran informasi dan pengalaman terkait pengembangan transportasi;
- membina kemitraan antara para ahli, dan pertukaran personel;
- peningkatan partisipasi bersama dalam proyek konstruksi di salah satu negara atau di negara ketiga;
- dorongan partisipasi dalam seminar teknis, pameran, dan pameran;
- fasilitasi penyediaan sumber daya manusia, peralatan, dan material terkait transportasi;
- pertukaran dosen/pelatih di bidang transportasi darat, udara dan kereta api antar belah pihak;

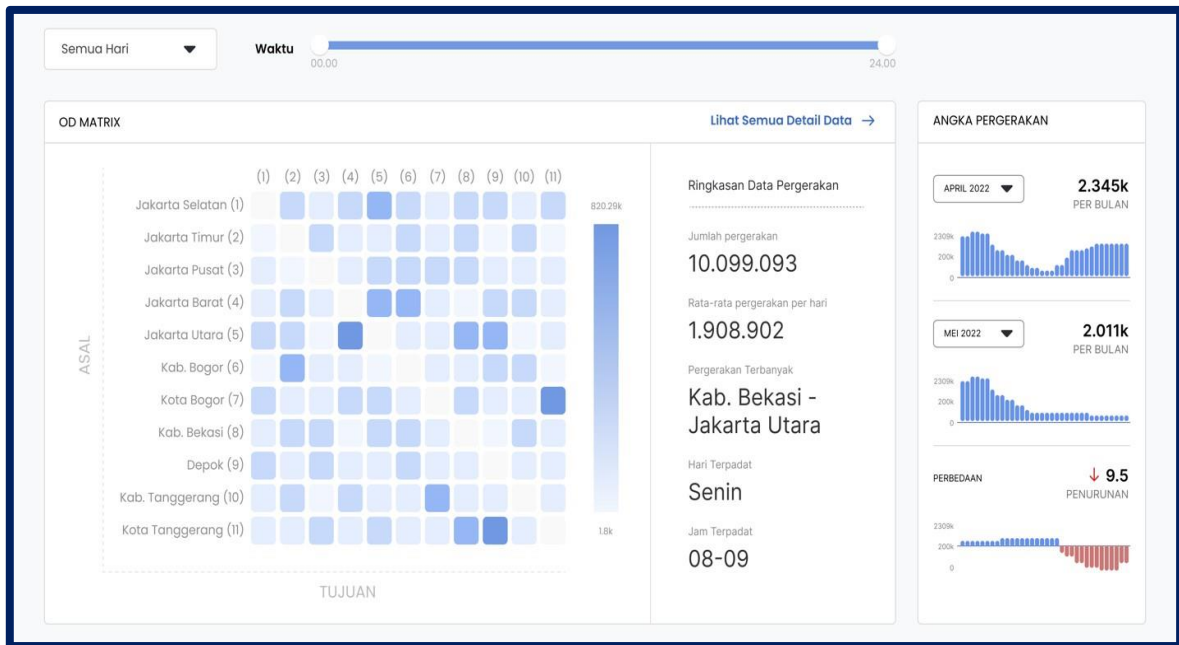
- fasilitasi pelatihan, seminar, lokakarya, kursus pelatihan teknis, dan pelatihan pelatih di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengembangan transportasi antar Pihak;
- pengembangan sumber daya manusia (capacity building), dan transfer pengetahuan dan teknologi dalam keselamatan dan keamanan transportasi, termasuk tanggap kecelakaan;
- fasilitasi peningkatan keselamatan transportasi, keamanan dan perlindungan environmental; dan
- segala bentuk kerja sama lain yang dapat diputuskan bersama oleh kedua belah pihak

2. Pembangunan Sistem Asal-Tujuan Berbasis Big Data

Tujuan dari kegiatan ini adalah menghasilkan sistem untuk memproses dan memvisualisasikan big data pergerakan asal-tujuan orang di wilayah Jabodetabek. Dengan input tersebut, diharapkan semua pihak pengambil kebijakan dapat membuat keputusan strategis berdasarkan data yang telah diproses melalui sistem. Selanjutnya, data yang dihasilkan akan memungkinkan bagi pemerintah untuk memantau perkembangan mobilitas transportasi secara berkala, sehingga dapat melakukan pengembangan sekaligus evaluasi berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja layanan lalu lintas perkotaan di wilayah Jabodetabek dan membangun transportasi perkotaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Jabodetabek.

Perancangan sistem Pemetaan Asal-Tujuan Pergerakan Orang di Jabodetabek Berbasis Big Data ini menghasilkan kerja sama berkelanjutan dengan 5 (lima) stakeholder operator transportasi publik di wilayah Jabodetabek. Stakeholder layanan transportasi berbasis rel yaitu pihak PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI), PT. Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta, dan PT. Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Selanjutnya terdapat juga kerja sama dengan pihak PT. Transjakarta dan Perum PPD (TransJabodetabek) sebagai layanan transportasi umum berbasis jalan. Para stakeholder tersebut berperan sebagai kontributor penyedia data dan bersepakat untuk mengintegrasikan data perjalanan penumpang mereka ke dalam sistem pemetaan BPTJ, secara berkelanjutan dan tanpa beban biaya.





Gambar 7. 1 Sistem Asal-Tujuan Berbasis Big Data

Sumber: Laporan Akhir Pembangunan Sistem Pemetaan Asal Tujuan Pergerakan Orang Berbasis Big Data

BAB VIII REGULASI

Bagian Hukum telah melakukan penyusunan dan penerbitan Dokumen Rancangan Peraturan di lingkungan BPTJ. Rancangan peraturan-peraturan tersebut berasal dari pengajuan oleh Direktorat teknis ataupun bagian terkait, yaitu 39 peraturan yang telah disahkan dari total 51 peraturan yang diajukan, terdiri dari 38 Surat Keputusan Kepala BPTJ dan 1 Peraturan Kepala BPTJ. Masih terdapat 12 dokumen rancangan peraturan yang belum disahkan karena masih *di-hold*. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Penerbitan Peraturan di Lingkungan BPTJ Tahun 2022

Unit Kerja	Total yang diajukan	Dokumen yang telah Disahkan
Sekretariat	23	14
Direktorat Prasarana	1	-
Direktorat Lalu Lintas	17	17
Direktorat Angkutan	10	8
Total	51	39

Sumber : Bagian Hukum, BPTJ

BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Alokasi Anggaran Tahun 2022

Alokasi anggaran BPTJ pada awal tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.284.830.332.000 (dua ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah). Anggaran tersebut telah mengalami 13 kali revisi anggaran sehingga pada akhir tahun 2022, total alokasi anggaran untuk BPTJ adalah senilai Rp.244.143.143.000 (dua ratus empat puluh empat miliar seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan pembagian anggaran per jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 9. 1 Alokasi anggaran BPTJ berdasarkan jenis belanja

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	%
Belanja Pegawai	27,101,458,000	11,10%
Belanja Barang	152,088,523,000	62,29%
Belanja Modal	64,953,162,000	26,60%
Total	244.143.143.000	100%

Sumber: Aplikasi Keuangan

Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. 2 Alokasi anggaran BPTJ berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	33.318.499.000
2	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	90.228.358.000
3	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	20.633.080.000
4	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	30.681.177.000
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	2.387.189.000
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Jabodetabek	63.034.997.000
7	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	2.078.759.000
8	Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	1.781.084.000
Total		244.143.143.000

Sumber: Aplikasi Keuangan

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Anggaran BPTJ sepanjang tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp.244.082.652.880 (dua ratus empat puluh empat miliar delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 99,98% terhadap pagu total.

Tabel 9. 3 Realisasi anggaran per jenis belanja BPTJ tahun 2022

Jenis Belanja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Belanja Pegawai	27.101.458.000	27.101.458.000	100,00%
Belanja Barang	152.088.523.000	152.025.916.962	99,96%
Belanja Modal	64.953.162.000	64.952.509.593	100,00%
Total	244.143.143.000	244.082.652.880	99,98%

Tabel 9. 4 Realisasi anggaran BPTJ berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Jabodetabek	33.318.499.000	33.318.438.000
2	Pelayanan Transportasi Jabodetabek	90.228.358.000	90.224.722.808
3	Keselamatan Transportasi Jabodetabek	20.633.080.000	20.632.097.854
4	Penunjang Teknis Transportasi Jabodetabek	30.681.177.000	30.663.908.803
5	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Jabodetabek	2.387.189.000	2.386.731.839
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Jabodetabek	63.034.997.000	63.003.117.879
7	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Jabodetabek	2.078.759.000	2.077.922.177
8	Legislasi dan Litigasi Transportasi Jabodetabek	1.781.084.000	1.775.713.520
Total		244.143.143.000	244.082.652.880

Pelaksanaan anggaran digunakan untuk menunjang Indikator Kinerja Utama BPTJ yang telah tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Anggaran dialokasikan kepada Indikator Kinerja Program sehingga target kinerja yang telah direncanakan dapat tercapai dalam waktu yang ditentukan. Realisasi anggaran BPTJ berdasarkan masing-masing indikator kinerja program telah mencapai rata-rata 99,96% Alokasi anggaran dan realisasi anggaran per Indikator Kinerja Program (IKP) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 9. 5 Realisasi anggaran per IKP BPTJ tahun 2022

Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi	%
IKP1 Indeks Konektivitas Transportasi Perkotaan di Jabodetabek	45.139.126.000	45.136.125.837	99,99%
IKP2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	99.045.013.000	99.039.372.371	99,99%
IKP2.2 OTP Layanan Transportasi Perkotaan Jabodetabek	6.507.046.000	6.498.956.228	99,88%
IKP3 Persentase Perjalanan Angkutan Umum yang Bebas Kecelakaan Lalu Lintas dalam 10.000 Keberangkatan	24.169.929.000	24.164.713.029	99,98%
IKP5 Indeks Reformasi Birokrasi BPTJ	69.282.029.000	69.243.485.415	99,94%
Total	244.143.143.000	244.082.652.880	99,98%

Sumber: Aplikasi Keuangan

BAB X KEGIATAN PENUNJANG

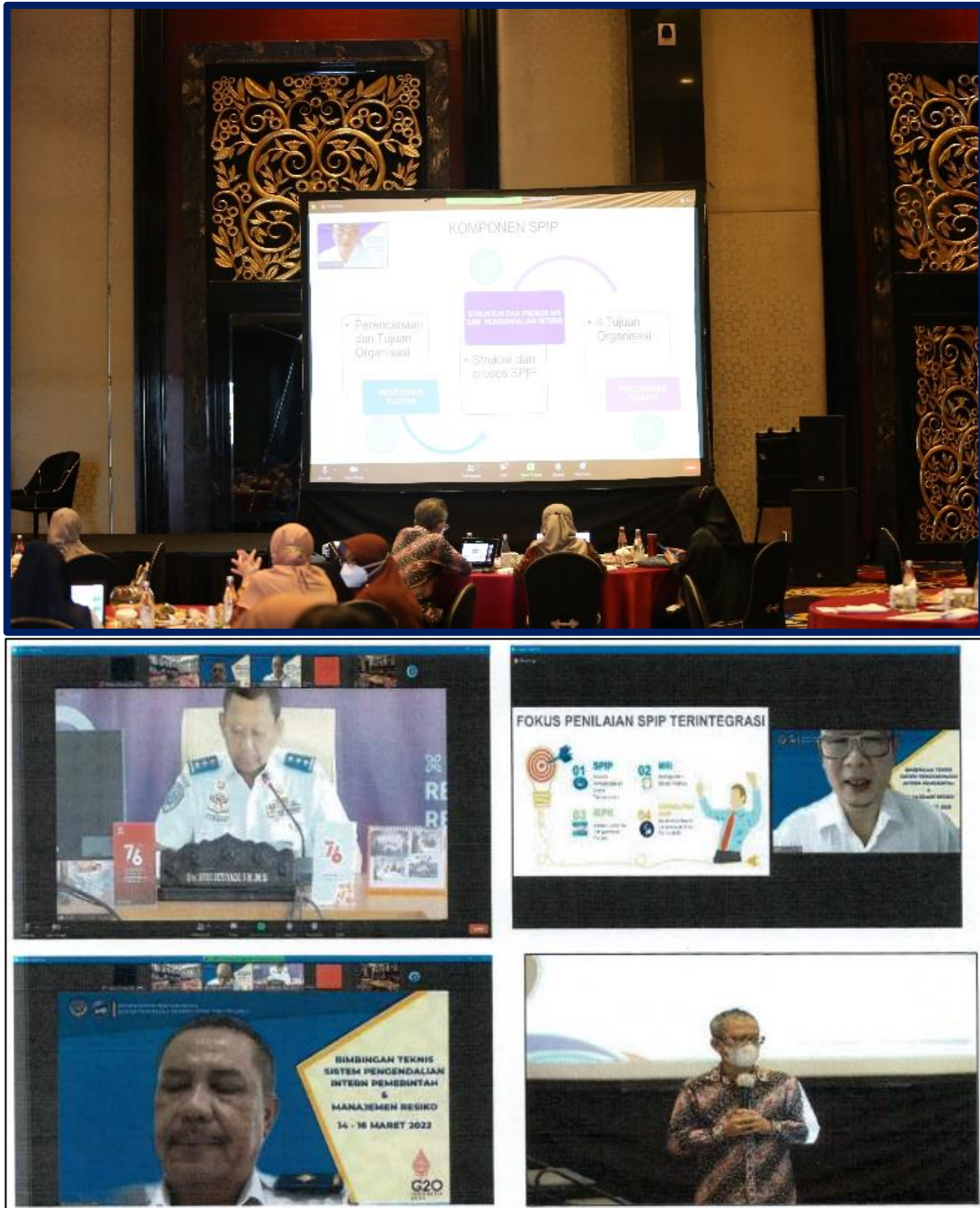
1. Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPTJ

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2022 di Bandung. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan tingkatan unit kerja dalam mengendalikan potensi risiko dan pelaksanaan pengendaliannya untuk mencapai tugas pokok dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penyusunan SPIP di lingkungan BPTJ dikoordinasikan oleh Sekretariat BPTJ, khususnya Bagian Perencanaan dan Keuangan. Tujuan diselenggarakannya bimbingan teknis ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi.



Gambar a

Bimbingan Teknis SPIP merupakan wadah peningkatan kualitas SDM di lingkungan BPTJ yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para Pejabat dan Satuan Tugas terhadap unsur-unsur SPIP sehingga dapat mewujudkan efektifitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



Gambar b

Gambar 10. 1 a dan b Bimbingan Teknis Pelaksanaan SPIP 2022 di Lingkungan BPTJ

2. Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di BPTJ

Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPTJ pada tanggal 15 s.d. 16 Maret 2022. Administrasi perkantoran merupakan faktor penting dalam menjalankan tugas dan fungsi BPTJ. Administrasi perkantoran yang dimaksud meliputi penciptaan naskah dinas termasuk manajemen surat masuk dan surat keluar. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk pembelajaran bagi pegawai di lingkungan BPTJ agar naskah dinas yang tercipta di lingkungan BPTJ sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta bersama-sama mengevaluasi naskah dinas yang sudah tercipta di lingkungan BPTJ sehingga mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam penciptaan surat. Dengan adanya pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran di

BPTJ melalui kegiatan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas mempunyai dampak pada meningkatnya pemahaman pegawai di lingkungan BPTJ terkait pembuatan naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



Gambar 10. 2 Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas di Lingkungan BPTJ

3. Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di Perusahaan Angkutan Barang

Kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di Perusahaan Angkutan Barang dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha angkutan barang terhadap seluruh resiko yang timbul akibat proses bisnis perusahaan mereka dari tingkat manajerial hingga operasional dan bagaimana membuat program pengendalian atas resiko tersebut. Kegiatan Konsinyering Persiapan Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 11 November 2022 di Bogor. Adapun kegiatannya adalah:

- Rapat Audiensi Persiapan Pelaksanaan Pembimbingan SMK Perusahaan Angkutan Barang;
- Kegiatan mengklasifikasi data pada dokumen SMKPAU;
- Pelaksanaan Konsinyering Persiapan Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum;
- Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum di 4 perusahaan yang telah mengajukan surat penilaian dokumen SMKPAU (PT Duta Lintas Nusa, PT. Mayasari Bakti, Perum PPD, PT. Anugerah Mas.
- Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di Perusahaan Angkutan Barang serta penyerahan sertifikat kepada perusahaan yang telah dinilai dokumen SMKPAU.

Adapun hasil kegiatan sebagai berikut:

- Peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Barang;
- Peningkatan jumlah perusahaan angkutan barang yang menerapkan dan memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di Jabodetabek.
- Meningkatnya kesadaran perusahaan angkutan barang terhadap keselamatan dalam operasional pelayanan angkutan barang di wilayah Jabodetabek.



Gambar a



Gambar b

Gambar 10. 3 a dan b Dokumentasi Kegiatan Konsinyering Persiapan Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Tahun 2022 dari tanggal 9 s.d. 11 November 2022



Gambar a



gambar b

Gambar 10. 4 a dan b Dokumentasi Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum Perum PPD dilaksanakan di Pool Perum PPD Depok dari tanggal 17 s.d. 19 November 2022

4. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru

Kegiatan ini meliputi pemantauan penyelenggaraan angkutan Lebaran Tahun 2022, Natal 2022 dan Tahun baru 2023, serta antisipasi libur panjang dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah terutama di wilayah Jabodetabek. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk upaya pemeriksaan kelaikan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan umum.



Gambar a



Gambar b

Gambar 10. 5 a dan b Posko Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru pada tanggal 19 Desember 2022 s.d. 4 Januari 2023 di Terminal Wilayah Jabodetabek

5. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Sarana Angkutan di Wilayah Jabodetabek

Kegiatan rampcheck dilakukan secara berkala dengan tujuan menjamin terwujudnya peningkatan kelaikan sarana angkutan umum dan terpenuhinya penyelenggaraan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada UU beserta aturan pelaksanaannya. Kegiatan rampcheck dilakukan di 4 terminal Tipe A dibawah naungan BPTJ.



Gambar a



Gambar b



Gambar c



Gambar d

Gambar 10. 6 a, b, c, dan d Dokumentasi Kegiatan Ramp Check di Terminal Wilayah Jabodetabek

6. Melaksanakan Monitoring Pengawasan Andalalin di Wilayah Jabodetabek

Pengawasan/pemeriksaan Angkutan Umum bertujuan untuk memantau apakah rencana penanganan lalu lintas yang telah diusulkan oleh studi Analisis Dampak Lalu Lintas dapat mengatasi permasalahan lalu lintas dengan mengambil data dari hasil survey dan analisis yang telah dilakukan. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan oleh tim teknis andalalin di Sub Direktorat Lalu Lintas Transportasi Darat dengan melakukan inventarisasi ketersediaan rekomendasi yang telah diusulkan, menghitung besaran bangkitan dan tarikan perjalanan yang ditimbulkan dengan kondisi terkini, menganalisa kinerja lalu lintas eksisting di sekitar kawasan pembangunan, melakukan evaluasi rekomendasi yang diusulkan terhadap permasalahan lalu lintas, dan meninjau kembali dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang telah disusun dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kegiatan monitoring pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. 1 Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas

NO.	LOKASI MONITORING PENGAWASAN ANDALALIN	WILAYAH	TANGGAL PELAKSANAAN	NOMOR REKOMENDASI
1	Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran	Kota Tangerang	12 Januari 2022	SK. 99 BPTJ TAHUN 2020
2	Mc Donalds Bojongsari	Kota Depok	22 Februari 2022	KP-BPTJ 171 Tahun 2021
3	Mc Donalds Parung	Kab. Bogor	22 Februari 2022	KP-BPTJ 143 Tahun 2021
4	PT. Givaudan Indonesia	Kab. Bekasi	8 Maret 2022	KP-BPTJ 123 Tahun 2021
5	Lippo Mall Cimanggis	Kota Depok	24 Maret 2022	SK.446/PR.207/BPTJ-2017
6	SPBU Shell Jl. Sawangan	Kota Depok	29 Maret 2022	SK. 291 BPTJ TAHUN 2020
7	Pizza Hut Tambun Selatan	Kab. Bekasi	31 Mei 2022	SK. 180 BPTJ TAHUN 2020
8	Cimory Dairyland Puncak	Kab. Bogor	4 Juli 2022	SK. 47 BPTJ TAHUN 2020
9	Warehouse Modern Depok	Kota Depok	12 Juli 2022	KP-BPTJ 124 Tahun 2021
10	Rest Area KM 19B Tol Jakarta Cikampek	Kab. Bekasi	9 Agustus 2022	SK-BPTJ 48 TAHUN 2022
11	Restoran Raa-Cha Bogor	Kota Bogor	30 Agustus 2022	SK. 419 BPTJ TAHUN 2020
12	Restoran Mie Gacoan Pajajaran	Kota Bogor	7 September 2022	KP-BPTJ 49 TAHUN 2022
13	Riverdale Cibitung	Kab. Bekasi	13 Oktober 2022	SK. 71 BPTJ TAHUN 2020
14	PT. Bridon	Kab. Bekasi	19 Oktober 2022	SK. 321 TAHUN 2019

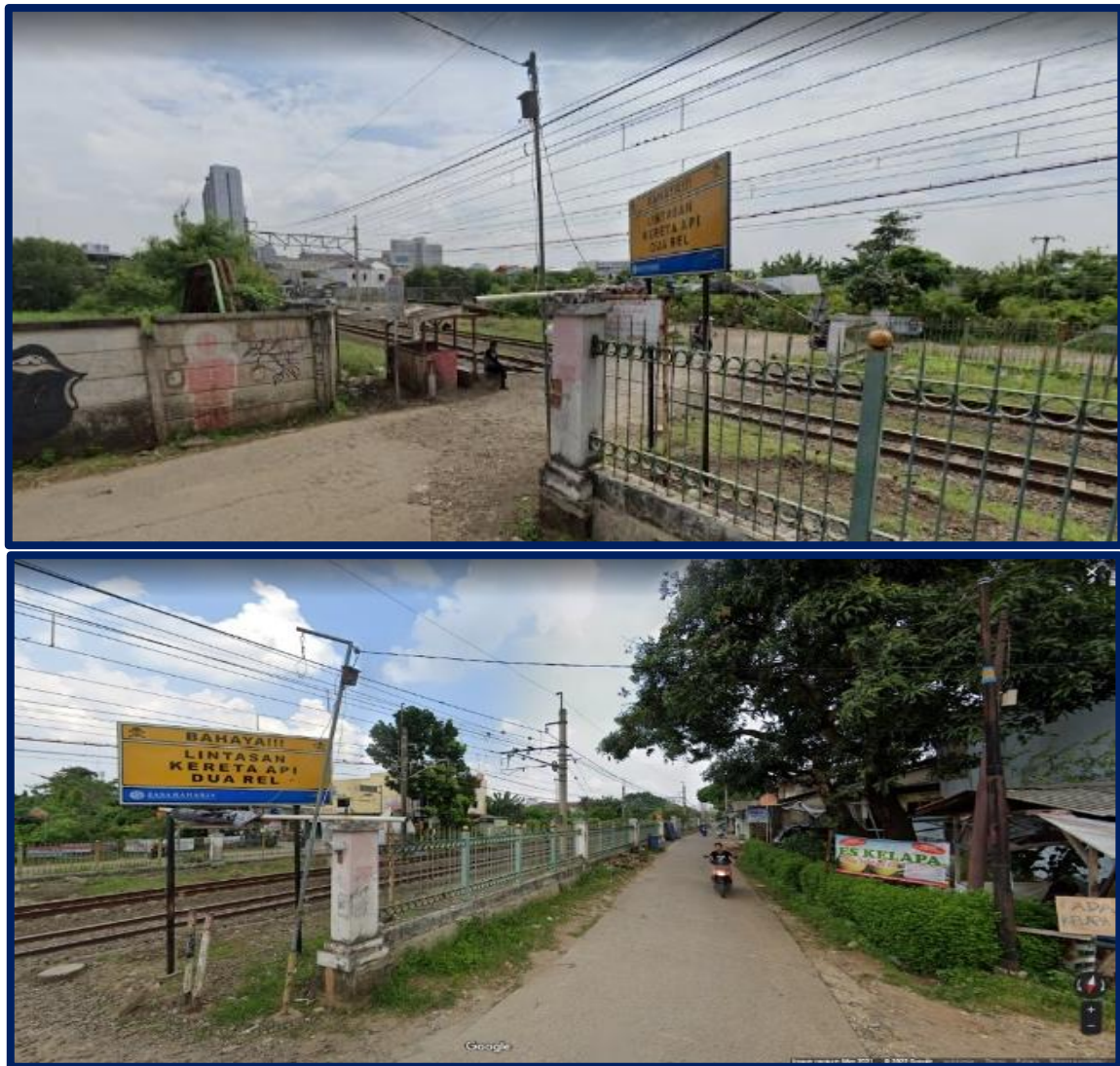


Gambar 10. 7 Pelaksanaan Monitoring Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas berlokasi di Kabupaten Bogor

7. Monitoring dan Inventarisasi Kebutuhan Perambuan Kereta Api Lintas Jabodetabek

Kegiatan ini bermaksud untuk mendukung pelaksanaan tugas BPTJ dalam meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek dan memberikan penilaian terhadap perambuan yang ada di perlintasan sebidang di wilayah Jabodetabek serta perumusan rekomendasi kebutuhannya.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tim teknis Sub Direktorat LLKA melakukan survei dan pengumpulan data terkait kondisi – kondisi perambuan di perlintasan sebidang dan juga mengidentifikasi titik – titik perlintasan sebidang resmi dan tidak resmi di wilayah Jabodetabek. Hasil dari kegiatan survei yang telah dilaksanakan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perumusan rekomendasi dan kebijakan dalam penanganan permasalahan – permasalahan yang ada di perlintasan sebidang. Diantaranya adalah dengan melakukan pemasangan fasilitas keselamatan yang belum ada atau telah rusak dan juga perencanaan penanganan kemacetan yang ditimbulkan di perlintasan sebidang dengan pembangunan perlintasan tidak sebidang berupa flyover/underpass.



Gambar 10. 8 Dokumentasi Monitoring Kebutuhan Perambuan di Perlintasan Sebidang Lintas Stasiun Depok Baru - Stasiun Pondok Cina

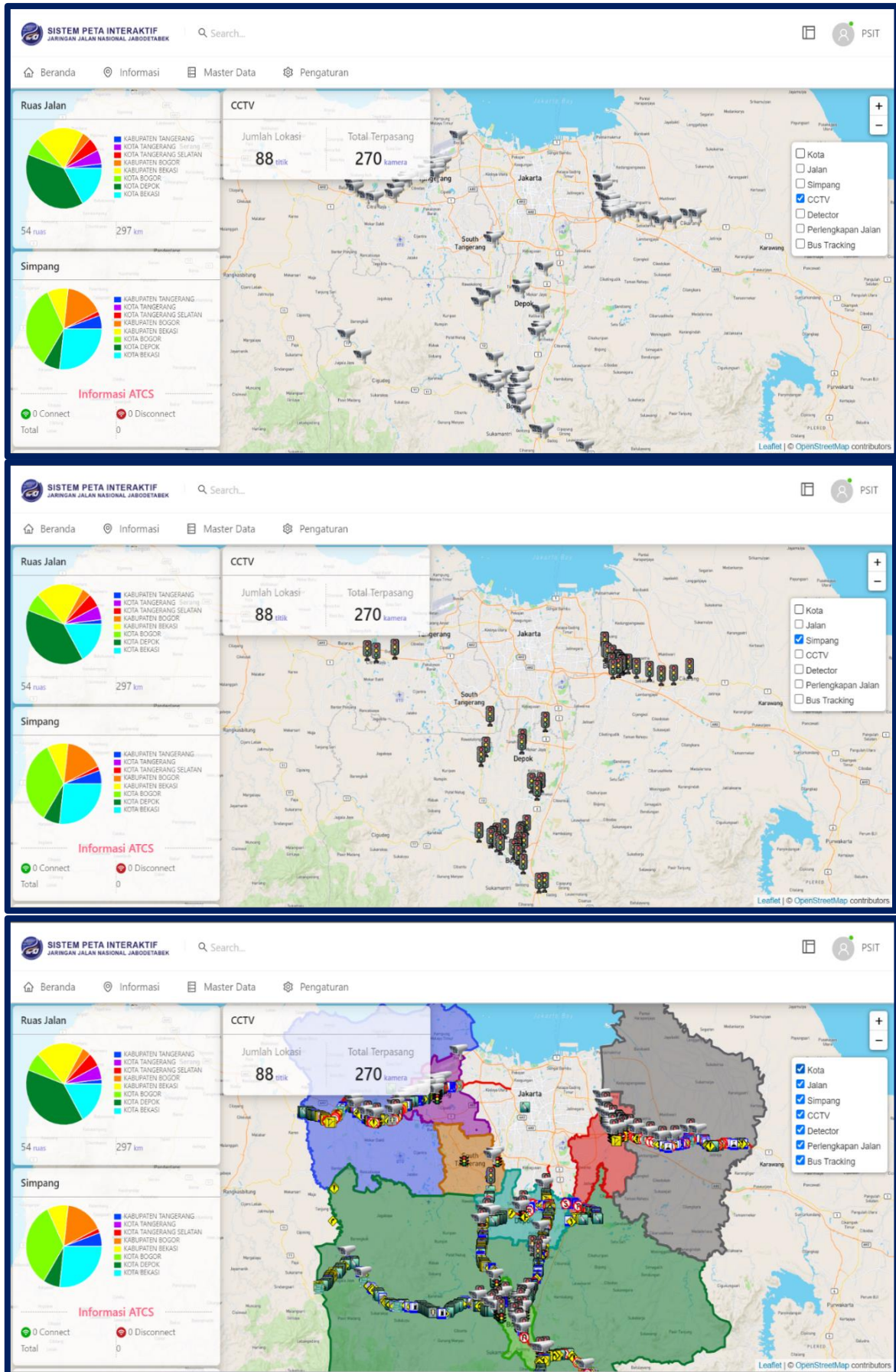


Gambar 10. 9 Dokumentasi Monitoring Kebutuhan Perambuan Perlindungan Sebidang di Lintas Stasiun Tenjo – Stasiun Tigaraksa

8. Pengoperasian Aplikasi Peta Interaktif

Peta Interaktif adalah sebuah aplikasi yang dapat mengidentifikasi dan menginventarisasi kondisi sarana dan prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek. Fungsi dari adanya pengoperasian aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- Menginput database (Data Entry) ke sistem aplikasi
- Memberikan informasi yang akurat kondisi perlengkapan jalan di wilayah jabodetabek dalam bentuk peta. (penjelasan tentang lokasi, jenis rambu, dsb)
- Menyediakan rekaman data lalu lintas, kejadian kecelakaan, dan kejadian lainnya di persimpangan.

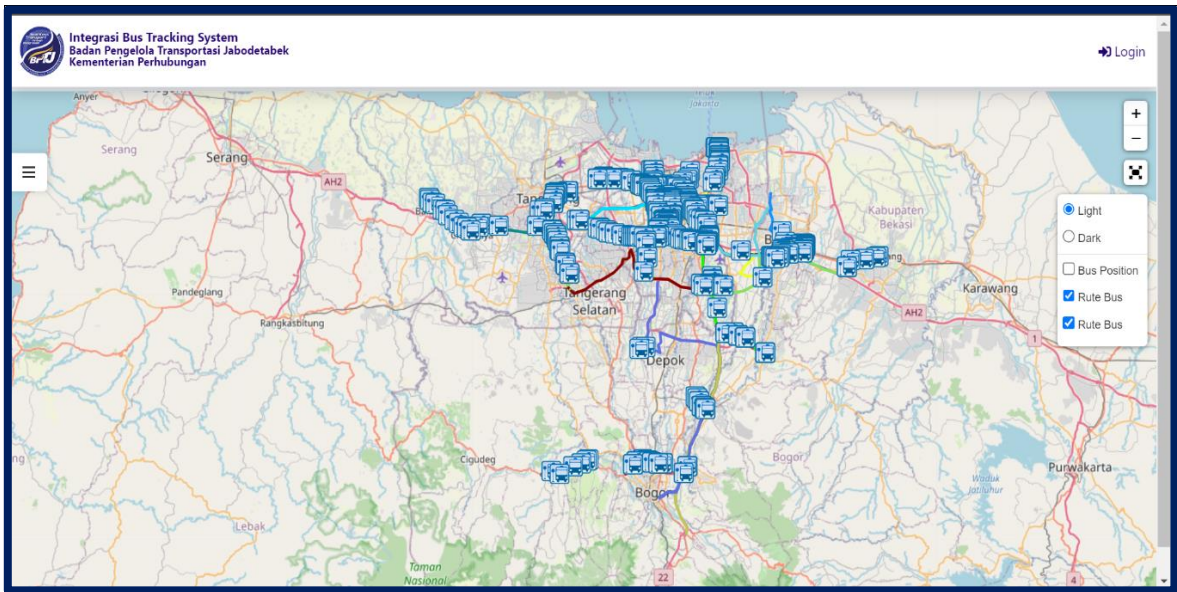


Gambar 10. 10 Dokumentasi Aplikasi Peta Interaktif

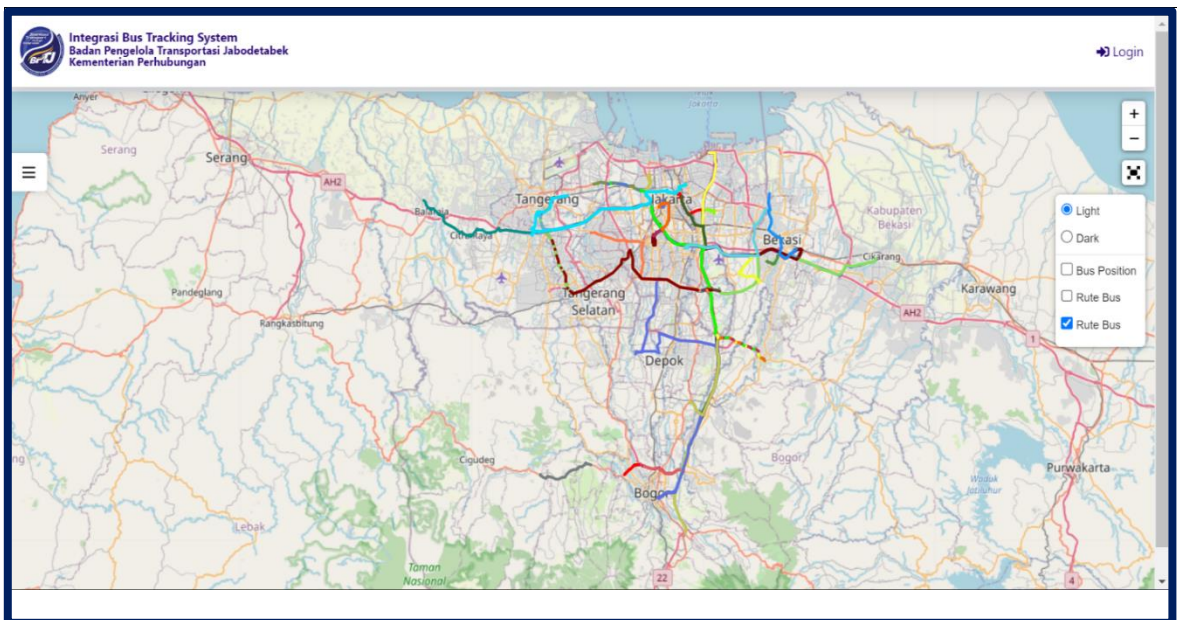
9. Pengoperasian Aplikasi Bus Tracking System – Pengembangan

Bus Tracking System adalah sebuah aplikasi berbasis web yang dapat melacak keberadaan bus-bus umum di wilayah Jabodetabek. Fungsi dari adanya pengoperasian aplikasi ini adalah sebagai berikut:

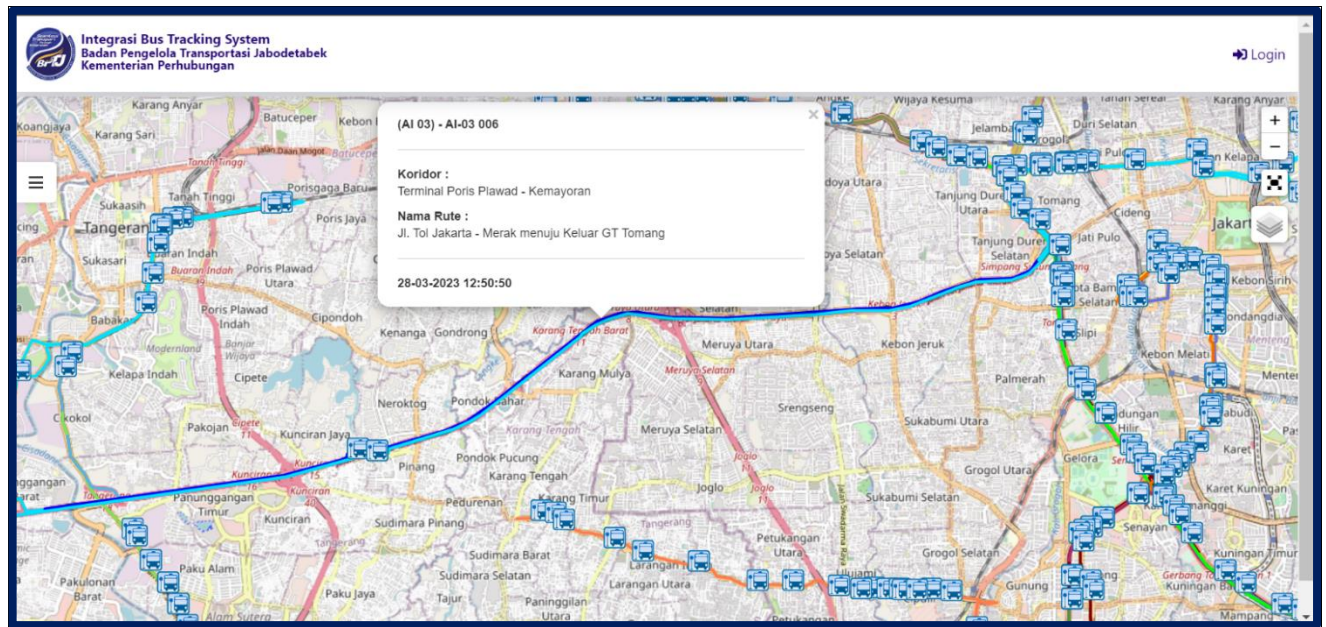
- Menginput database (Data Entry) ke sistem aplikasi:
- Mengetahui kendaraan angkutan berhenti atau tidak pada tempatnya dan menghindari penyimpangan rute:
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan kepada masyarakat akan penggunaan sarana dan prasarana transportasi di wilayah Jabodetabek.



gambar a



gambar b



gambar c

Gambar 10. 11 a, b, dan c Dokumentasi Aplikasi Bus Tracking System

BAB XI PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) secara umum telah sesuai dengan rencana. Namun demikian, dalam pelaksanaan masih dijumpai permasalahan-permasalahan, seperti keterbatasan anggaran yang disediakan oleh APBN (automatic adjustment), menjadi permasalahan dalam pembangunan dan jaringan transportasi umum. Selain itu terkait Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), Pelaksanaan RITJ melibatkan 5 Kementerian/Lembaga dan 11 Pemerintah Daerah. BPTJ mendapatkan mandat sebagai koordinator dari pelaksanaan RITJ tersebut. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dan dukungan penuh dari masing-masing instansi terkait.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan strategis, baik yang menggunakan APBN maupun non APBN dengan kriteria skala nasional, untuk mengembangkan transportasi wilayah Jabodetabek. Kegiatan strategis tersebut yaitu program subsidi angkutan umum *Buy The Service* (BTS), Fasilitasi teknis fasilitas sistem keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan di Jabodetabek, pembangunan fasilitas integrasi (*Skybridge*) Stasiun Bojong Gede ke Terminal Bojong Gede, dan Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg.

Selain kegiatan strategis tersebut, BPTJ juga telah melaksanakan sejumlah program/kegiatan internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan dalam rangka mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah Jabodetabek. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan transportasi untuk masyarakat yang sesuai dengan prinsip dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu selamat, aman, handal, nyaman, mudah, dan setara.

Pencapaian BPTJ selama tahun 2022 tidak terlepas dari peran aktif seluruh jajaran Pejabat Struktural, Fungsional, dan Staf di lingkungan BPTJ yang telah bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan baik dengan semua pihak terkait. Selain itu, dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tercapainya kegiatan yang telah direncanakan.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (PN) TAHUN 2022 (1/2)

REAKTIVASI STASIUN PONDOK RAJEG

1



RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Pengangkatan Track Jalan KA dengan kelandaian emplasemen **1.15 ‰** dan di lintas **9.5 ‰**
2. Penyesuaian Ketinggian **Jaringan LAA**
3. Pembangunan **Struktur Peron** sepanjang **240 m**
4. Pembangunan **Struktur Bawah** Gedung Stasiun

2

PEMBANGUNAN SKYBRIDGE BOJONGGEDE



PROGRES PEMBANGUNAN 94%

Skybridge Bojonggede menghubungkan antara Stasiun Bojonggede dengan Terminal Penumpang Tipe C Bojonggede dengan **panjang 243m**.

Pembangunan dilakukan di atas tanah milik Pemda Kab. Bogor. Sehingga setelah pembangunan selesai bangunan skybridge akan dihibahkan kepada **Pemda Kab. Bogor**.

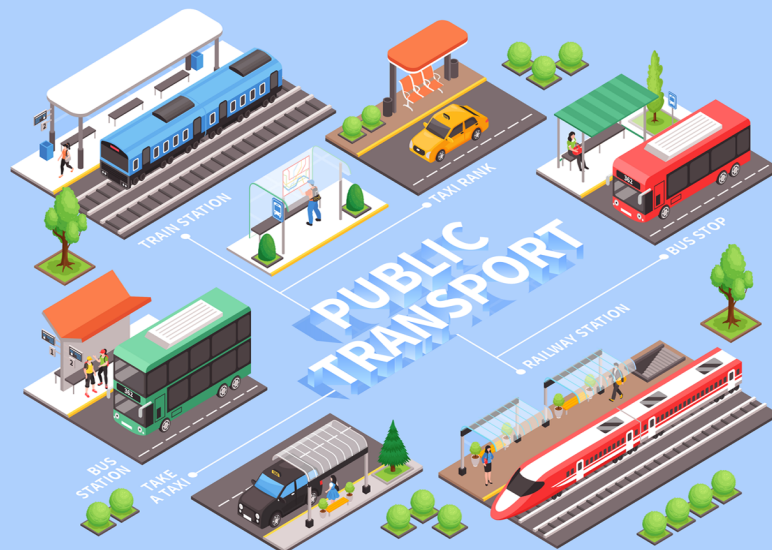
SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG (BTS)

3



LAPORAN ANGKUTAN

1. Pertumbuhan jumlah penumpang **5-10% /bulan**
2. Jumlah rata-rata penumpang: **20,885 orang**
3. Load Factor s.d Desember **158%**
4. Trayek yang dilayani sebanyak **4 Trayek**





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL (PN) TAHUN 2022 (2/2)

PEMBANGUNAN ATCS TERINTEGRASI

4



PEMASANGAN ATCS TA.2022 PADA 10 TITIK LOKASI PEMASANGAN SIMPANG

1. Simpang 3 Lemah Abang (Bekasi)
2. Simpang 3 Polsek Jasinga (Kabupaten Bogor)
3. Simpang 3 Polsek Cigudeg (Kabupaten Bogor)
4. Simpang 3 Manis (Kota Tangerang)
5. Simpang 4 Cimone (Kota Tangerang)
6. Simpang 4 Siliwangi / jati uwung (Kota Tangerang)
7. Simpang 3 Pajajaran (Kota Tangerang)
8. Simpang 4 Gajah Tunggal / jatake (Kota Tangerang)
9. Simpang 4 kampung utan WIN (Tangerang Selatan)
10. Simpang 3 Cangkudu (Kabupaten Tangerang)

5

PENGADAAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN



RAMBU LALU LINTAS

99 UNIT



MARKA JALAN

292.437
METER



LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

217 UNIT



WARNING LIGHT

17 UNIT

No	Ruas Jalan
1	Ruas Jalan Ciawi - Puncak (Nomor Ruas 074)
2	Ruas Jalan Raya Serang (Bts. Kota Serang . Bts. Kota Tangerang) (Nomor Ruas 003)
3	Ruas Jalan Nasional Wilayah Kota Tangerang (Nomor Ruas 003 004)
4	Di Ruas Jalan Bts Depok Bogor . Bogor (Nomor Ruas 012)
5	Ruas Jalan Bts Depok Bogor . Bogor (Nomor Ruas 012)
6	di Ruas Jalan Nasional Batas Jasinga . Jalan Raya Leuwiliang (Kode Ruas 022)
7	Ruas Jalan Cigelug (Bts.Banten) - Jasinga (Nomor Ruas 021)
8	Ruas Jalan Cigelug (Bts.Banten) - Jasinga (Nomor Ruas 021)
9	di Ruas Jalan Raya Bogor (Gandaria Bts. DKI Jakarta . Kedunghalang Bts. Bogor) (Nomor Ruas 072 073)
10	Ruas Jalan Raya Bogor (Gandaria Bts. DKI Jakarta . Kedunghalang Bts. Bogor) (Nomor Ruas 072 073)
11	di Ruas Jalan Kabupaten Bekasi Bekasi Cikarang (Bts. Kab. Bekasi - Kab. Karawang) (Nomor Ruas 002 dan 003)
12	Ruas Jalan Kabupaten Bekasi Bekasi Cikarang (Bts. Kab. Bekasi - Kab. Karawang) (Nomor Ruas 002 dan 003)
13	di Ruas Jalan Kota Bekasi (Bts. DKI Jakarta - Kota Bekasi) (Nomor Ruas 001)
14	Ruas Jalan Kota Bekasi (Bts. DKI Jakarta - Kota Bekasi) (Nomor Ruas 001)
15	di Ruas Jalan Ciawi - Puncak (Nomor Ruas 074)
16	Ruas Jalan Raya Transyogi (Nomor Ruas 097), Jalan Letda Natsir (Nomor Ruas 097), Jalan Raya Cimanggis - Nagrak (Nomor Ruas 097)
17	Ruas Jalan Raya Transyogi (Nomor Ruas 097), Jalan Letda Natsir (Nomor Ruas 097), Jalan Raya Cimanggis - Nagrak (Nomor Ruas 097)

Kompilasi Rancangan Peraturan selama Tahun 2022

No.	Waktu Pengajuan	Nama Peraturan	PIC	Waktu Pengesahan
1	Jan-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN BPTJ TAHUN ANGGARAN 2022	Umum	Jan-22
2	Jan-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BPTJ TAHUN 2022	Evaluasi	Jan-22
3	Jan-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BPTI TAHUN 2022	Evaluasi	Jan-22
4	Jan-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGOPERASIAN PADA JALAN NASIONAL DI WILAYAH BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2022	PSIT	Jan-22
5	Jan-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR KEGIATAN CONTACT CENTER 151 TIER II KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2022	Humas	Feb-22
6	Jan-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	Humas	Feb-22
7	Jan-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2022	Humas	Feb-22
8	Jan-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM TIM PENGELOLAAN WEBSITE DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2022	Humas	Feb-22
9	Feb-22	PERATURAN KEPALA BPTJ TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERLENGKAPAN JALAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI	Keuangan dan BMN	Hold
10	Feb-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	Kepegum	Feb-22
11	Feb-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG TIM PELAKSANA MANAJEMEN PENGELOLA PEMBELIAN LAYANAN ANGKUTAN PERKOTAAN DENGAN SKEMA BUY THE SERVICE TRANS PAKUAN BOGOR TAHUN 2022	PPA	Feb-22
12	Mar-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM REPROGRAMMING PROGRAM TRAINING DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2022	Kepegum	Hold
13	Mar-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	Kepegum	Mar-22
14	Mar-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2022	Keuangan dan BMN	Mar-22
15	Mar-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PEMBINAAN KESELAMATAN ANGKUTAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2022	Angbar	Apr-22
16	Mar-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAYANAN DAN KOORDINASI PENGOPERASIAN AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM PADA JALAN NASIONAL DI WILAYAH BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2022	PSIT	Apr-22
17	Apr-22	PERATURAN KEPALA BPTJ TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENERIMAAN DAN AKUNTANSI HIBAH LANGSUNG BERBENTUK BARANG DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	Keuangan dan BMN	Hold
18	Apr-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POS KOORDINASI PEMANTAUAN TRANSPORTASI SELAMA MASA MUDIK IDUL FITRI TAHUN 1443 HIJRIAH DI WILAYAH DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	PPA	Apr-22

19	Apr-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG TIM PENYUSUNAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KETENTUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2018-2029	Hukum	Hold
20	Apr-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	Evaluasi	Apr-22
21	May-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG TIM PEMERIKSA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI ANGKUTAN UMUM MASSAL DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2022	Integrasi Prasarana	Hold
22	May-22	PERATURAN KEPALA BPTJ TENTANG PETUNJUK TEKNIS MEKANISME PENGAKUAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	Keuangan dan BMN	May-22
23	Jul-22	PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PENDAMPING PEKERJAAN INHOUSE CONSULTANT DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	Perencanaan	Hold
24	Jul-22	PEMBENTUKAN TIM PEKERJAAN REVIU RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2020-2024	Evaluasi	Hold
25	Jul-22	PEMBENTUKAN TIM PEKERJAAN PEMBANGUNAN SISTEM PEMETAAN ASAL TUJUAN PERGERAKAN ORANG BERBASIS BIG DATA	Perencanaan	Hold
26	Jul-22	KELOMPOK KERJA PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2023	Perencanaan	Aug-22
27	Aug-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN ANDALALIN DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH PENGEMBANGAN RS JULIANA TYPE C DI TAJUR, KOTA BOGOR	Lalin Transdar	Aug-22
28	Aug-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN ANDALALIN DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS TINGGI INDUSTRI PIPA BAJA SPIRAL PT SWARNA BAJA PACIFIC DI JALAN BTS, BALARAJA, KAB. TANGERANG	Lalin Transdar	Aug-22
29	Aug-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN ANDALALIN DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS TINGGI PABRIK PT COCA COLA BOTTLING DI JALAN RAYA BITUNG, CIKARANG, KAB. BEKASI	Lalin Transdar	Aug-22
30	Aug-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN ANDALALIN DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS SEDANG SPBU SHELL MARGONDA DI JALAN MARGONDA RAYA, BEJI, KOTA DEPOK	Lalin Transdar	Aug-22
31	Aug-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN ANDALALIN DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS SEDANG SPBU SHELL CIBUBUR DI JALAN TRANS YOGI, CIMANGGIS, KOTA DEPOK	Lalin Transdar	Aug-22
32	Aug-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN ANDALALIN DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH PEMBANGUNAN RS HERMINA CIAWI TYPE C DI JALAN CIAWI-PUNCAK, CIAWI, KAB. BOGOR	Lalin Transdar	Aug-22
33	Aug-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN ANDALALIN DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH PEMBANGUNAN GUDANG MATERIAL DISTRIBUTOR CAT, BAHAN BANGUNAN, PIPA DAN FURNITURE DI JALAN BTS, LEUWISADENG, KAB. BOGOR	Lalin Transdar	Aug-22
34	Sep-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS YANG BERSIFAT PERINTAH, LARANGAN, PERINGATAN DAN PETUNJUK PADA RUAS JALAN NASIONAL DI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	Lalin Transdar	Nov-22
35	Oct-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS SEDANG TERHADAP PEMBANGUNAN SHOWROOM MOBIL MITSUBISHI DI RUAS JALAN CILODONG/BTS. DEPOK – BTS. KOTA BOGOR NOMOR RUAS 073, DESA PABUARAN, KECAMATAN CIBINONG, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT	Lalin Transdar	Nov-22
36	Oct-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS TINGGI TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN H CITY SAWANGAN DI RUAS JALAN BTS. DEPOK/BOGOR -BOGOR NOMOR RUAS 070, DESA BOJONGSARI, KECAMATAN BOJONGSARI, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT	Lalin Transdar	Nov-22
37	Oct-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS TINGGI TERHADAP PUSAT PERBELANJAAN (ROBINSON) DAN HOTEL YELLOW BEE DI JALAN DAAN MOGOT NOMOR RUAS 004.11.K, KELURAHAN SUKARASA, KECAMATAN TANGERANG, KOTA TANGERANG, PROVINSI BANTEN	Lalin Transdar	Nov-22

38	Oct-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH PEMBANGUNAN RUKO DI JALAN RAYA KEDUNGHALANG BOGOR NOMOR RUAS 073.12.K, KELURAHAN CIBULUH, KECAMATAN BOGOR UTARA, KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT	Lalin Transdar	Nov-22
39	Oct-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS SEDANG TERHADAP PABRIK PT. HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK DI JALAN BTS. KOTA CIKARANG-BTS. KARAWANG NOMOR RUAS 004, DESA BOJONGSARI, KECAMATAN KEDUNGWARINGIN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT	Lalin Transdar	Nov-22
40	Oct-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH PEMBANGUNAN RUMAH MAKAN /RESTORAN DI JALAN KH. ABDULLAH BIN NUH NOMOR RUAS 023.12.K, KELURAHAN BUBULAK, KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT	Lalin Transdar	Nov-22
41	Oct-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH TERHADAP PEMBANGUNAN TOKO DAGING NUSANTARA PT. SURI NUSANTARA JAYA DI JALAN ABDULLAH BIN NUH NOMOR RUAS 023.11.K, KELURAHAN SINDANGBARANG, KECAMATAN BOGOR BARAT, KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT	Lalin Transdar	Nov-22
42	Oct-22	PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI NOMOR SK-BPTJ 44 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI DI WILAYAH AGLOMERASI PERKOTAAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI DARI DAN KE BANDARA UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA	Angkutan Orang	Hold
43	Nov-22	PERATURAN KEPALA BPTJ PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PERMUKIMAN DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG DAN BEKASI	Angkutan Orang	Hold
44	Nov-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PENETAPAN PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM PERUM PENGANGKUTAN PENUMPANG DJAKARTA	Angkutan Barang	Nov-22
45	Nov-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PENETAPAN PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM PT DUTA LINTAS NUSA	Angkutan Barang	Nov-22
46	Nov-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PENETAPAN PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM PT ANUGERAH MAS	Angkutan Barang	Nov-22
47	Nov-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PENETAPAN PEMENUHAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM PT MAYASARI BAKTI	Angkutan Barang	Nov-22
48	Dec-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A PORIS PLAWAD KOTA TANGERANG KEPADA PT NARENDRA TRANS TUNGGGA PUTRA	Keuangan dan BMN	Dec-22
49	Dec-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A PORIS PLAWAD KOTA TANGERANG KEPADA PIHAK PENYEWA DEVI MARLINA PAKPAHAN	Keuangan dan BMN	Hold
50	Dec-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK NEGARA DI TERMINAL PENUMPANG TIPE A PORIS PLAWAD KOTA TANGERANG KEPADA PIHAK PENYEWA PRIDA NAPITUPULU	Keuangan dan BMN	Hold
51	Dec-22	KEPUTUSAN KEPALA BPTJ TENTANG TIM PELAKSANA POSKO PEMANTAUAN TRANSPORTASI SELAMA PERIODE NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023 DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI	PPA	Dec-22